



PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo selama Tahun 2023 di beberapa bidang dan urusan sudah berjalan cukup baik. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kinerja harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan capaian kinerja yang belum memenuhi target mampu diidentifikasi permasalahan dan hambatannya yang selanjutnya disusun strategi perbaikan kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, mohon masukan konstruktif dan inovatif dari seluruh pemangku kepentingan guna perbaikan penyusunan LKjIP Kabupaten Probolinggo tahun berikutnya.

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

UGAS IRWANTO, S.Sos., M.Si.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai informasi kinerja yang disampaikan kepada publik dan sebagai umpan balik (**feedback**) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (lima) periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Probolinggo dan telah mengalami 2 kali perubahan RPJMD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023, penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Probolinggo dituangkan dalam bentuk agenda (tujuan) dan prioritas (sasaran) pembangunan pada RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Keberhasilan dan kurang optimalnya kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023, perlu dievaluasi guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat sebagai pertimbangan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penyesuaian kebijakan strategis melalui penetapan prioritas tema pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”**.



Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, maka ditetapkan 6 tujuan RPJMD yang diukur dengan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tujuan I : Mewujudkan masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu **Indeks Ketentraman Masyarakat**, mendapat predikat kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.
2. Tujuan II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, mendapat predikat kategori capaian **Baik (B)**.
3. Tujuan III : Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan, diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu **Tingkat Pengangguran Terbuka** dengan predikat capaian **Baik (B)**, dan **Tingkat Kemiskinan** dengan predikat capaian kategori **Baik (B)**, **Indeks Pembangunan Gender** masih dalam proses perhitungan BPS.
4. Tujuan IV : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**, mendapat predikat kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.
5. Tujuan V : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu **pertumbuhan ekonomi**, belum dapat diketahui capaiannya dan **Koefisien Gini** dengan predikat kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.
6. Tujuan VI : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu **Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan (IKLI+IKLH)** belum dapat diketahui capaiannya.



Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis dan beberapa program, kegiatan dengan capaian indikator kinerja daerah (IKD) sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya toleransi antar umat beragama, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan Minat Baca, diukur dengan 2 indikator yaitu indeks pendidikan dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)** dan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)**.
5. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas kesehatan, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
6. Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
8. Sasaran 8 : Tertanganinya Permasalahan Kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)**.
9. Sasaran 9 : Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)**.
10. Sasaran 10 : Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
11. Sasaran 11 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Masyarakat tidak bisa dihitung realisasinya diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender.
12. Sasaran 12 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, diukur dengan 2 (dua) Indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP dengan capaian kategori **Baik (B)** dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan



capaian kategori **Baik (B)**.

13. Sasaran 13 : Birokrasi yang Kapabel, diukur dengan 2 indikator yaitu Indeks SPBE dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)** dan Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**
14. Sasaran 14 : Pelayanan Publik yang Prima, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
15. Sasaran 15 : Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Kepariwisataaan, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
16. Sasaran 16 : Meningkatnya iklim investasi, diperoleh capaian realisasi investasi sampai dengan Tribulan 3 Tahun 2023 sebesar 45,29%. Penentuan kategori capaian kinerja masih menunggu realisasi investasi sampai dengan Tribulan 4 Tahun 2023.
17. Sasaran 17 : Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nelayan, dengan capaian kinerja kategori **Baik (B)**.
18. Sasaran 18 : Meningkatnya Ketahanan Pangan, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.
19. Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah, masih **dalam proses** perhitungan.
20. Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah, diukur dengan 2 indikator yaitu persentase kawasan permukiman layak dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)** dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (B)**.
21. Sasaran 21 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan daya tanggap bencana, dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik (SB)**.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM.....	2
1.4. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO	4
1.4.1. Letak dan kondisi geografis	4
1.4.2. Kondisi Demografi Daerah	5
1.4.3. Kondisi Perekonomian Daerah	7
1.5. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	9
1.6. SUMBER DAYA APARATUR.....	10
1.7. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO.....	11
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023.....	16
2.2. VISI DAN MISI.....	17
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	24
2.4. PERJANJIAN KINERJA	31
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.....	46
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA TAHUNAN 2023	55
1. Sasaran “Meningkatnya toleransi antar umat beragama”.....	57
2. Sasaran “Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum”	58
3. Sasaran “Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana”	59
4. Sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca”	63
5. Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan”	67



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

6. Sasaran “Meningkatnya daya beli masyarakat”	69
7. Sasaran “Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat”	80
8. Sasaran “Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial”	80
9. Sasaran “Meningkatnya kemandirian desa”	81
10. Sasaran “Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk”	83
11. Sasaran “Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat”	83
12. Sasaran “Birokrasi yang bersih dan akuntabel”	87
13. Sasaran “Birokrasi yang kapabel”	89
14. Sasaran “Pelayanan publik yang prima”	93
15. Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisata...”	97
16. Sasaran “Meningkatnya iklim investasi”	98
17. Sasaran “Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan”	99
18. Sasaran “Meningkatnya ketahanan pangan”	101
19. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah”.	104
20. Sasaran “Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah”	105
21. Sasaran “Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup”	107
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	109
3.3.1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	109
3.3.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	120
A. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	120
B. Realisasi Belanja Daerah.....	121
C. Realisasi Pembiayaan Daerah	122

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN	124
4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	125

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Probolinggo Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemkab Probolinggo ..	11
Tabel 2.1.	Matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten probolinggo	20
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2023 Pemkab Probolinggo	25
Tabel 2.3.	Perjanjian kinerja tahun 2023 Bupati Probolinggo	32
Tabel 2.4.	Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 Pemkab Probolinggo	35
Tabel 3.1.	Interval nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 1 Dan Sasarannya	56
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 2 dan Sasarannya	62
Tabel 3.4.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia	63
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 3 dan Sasarannya	71
Tabel 3.6.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka	73
Tabel 3.7.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin	75
Tabel 3.8.	Inventarisasi Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	76
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 4 dan Sasarannya	86
Tabel 3.10.	Perkembangan Nilai SAKIP Kab. Probolinggo	87
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 5 dan Sasarannya	96
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 6 dan Sasarannya	103
Tabel 3.13.	Persentase Alokasi Anggaran	109
Tabel 3.14.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	112
Tabel 3.15.	Pencapaian Indikator Tujuan (IKU) dan Indikator Sasaran (IKD)	117
Tabel 3.16.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	120
Tabel 3.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	121
Tabel 3.18.	Perincian Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah	122
Tabel 3.19.	Perincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	123



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Probolinggo	8
Grafik 3.1.	Diagram Alokasi Anggaran IKU Tahun 2023	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo	5
-------------	---	---



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan seluruh Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, bersih (bebas KKN), efektif dan efisien, kapable serta fokus pada peningkatan pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 memuat:

- a. Informasi kinerja yang terukur yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kab Probolinggo.
- b. Mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengalami perubahan RPJMD, yang pertama dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023. Perubahan kedua dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten



Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023, yang memuat tujuan, sasaran, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis sasaran strategis, hasil program serta kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen memenuhi target-target ini setiap tahunnya dengan menetapkan program dan kegiatan yang relevan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama satu tahun anggaran 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di masa yang akan datang.
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan terpercaya, yang pelaksanaannya menitikberatkan pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi pemerintah, serta berkaitan dengan upaya penggunaan sumberdaya masyarakat secara bijaksana.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gersik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PD.



1.4. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang berada pada posisi 7°40' s/d 8°10' Lintang Selatan dan 111°50' s/d 113°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili ketapang dengan luas wilayah 0,6 km².

Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan.

Luas wilayah Kabupaten Probolinggo lebih kurang 1.696,16 Km², terdiri atas :

Pemukiman	: 147,74 Km ²
Persawahan	: 373,13 Km ²
Tegal	: 513,80 Km ²
Perkebunan	: 32,81 Km ²
Hutan	: 426,46 Km ²
Tambak / kolam	: 13,99 Km ²
Pulau Gili Ketapang	: 0,6 Km ²
Lain lain	: 188,24 Km ²

Secara yuridis formal, Kabupaten Probolinggo dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, terdiri atas 24 wilayah kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan, 1.581 Rukun Warga (RW) dan 6050 Rukun Tetangga (RT).

Letak geografis Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:

Utara : Selat Madura

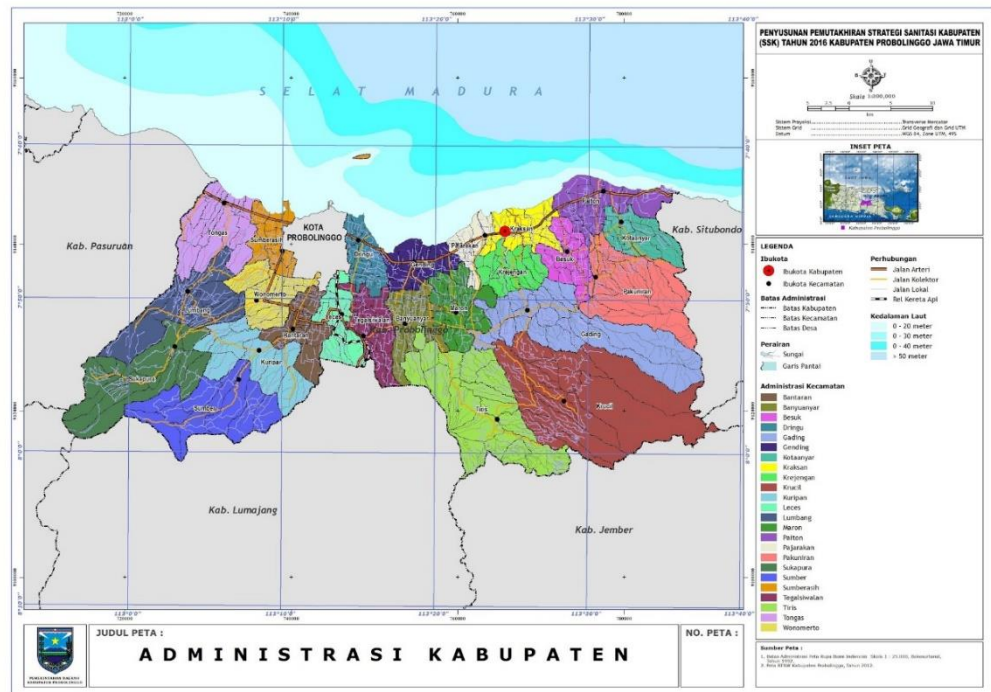
Timur : Kabupaten Situbondo

Barat : Kabupaten Pasuruan

Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo



Sumber: <https://peta-kota.blogspot.com/>

1.4.2 Kondisi Demografi Daerah

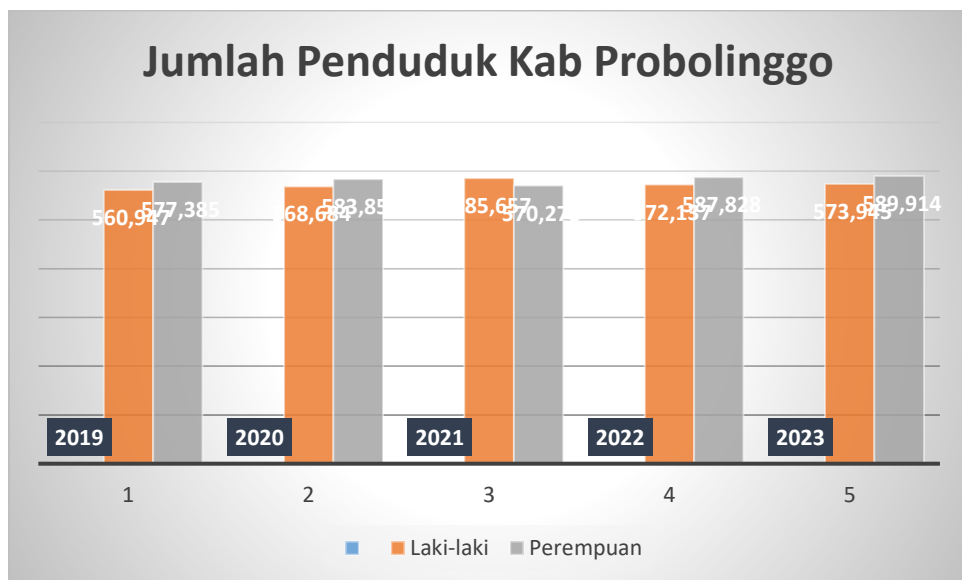
Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, menurut hasil Proyeksi Akhir Tahun Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 1.163.859 jiwa, terdiri dari 573.945 jiwa laki-laki dan 589.914 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo sebesar 0,34 % .



Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Probolinggo

NO.	URAIAN	KET	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laki – laki	Jiwa	560.947	568.684	585.657	572.137	573.945
2.	Perempuan	Jiwa	577.385	583.853	570.237	587.828	589.914
	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.138.332	1.152.537	1.155.894	1.159.965	1.163.859

Grafik 1.1
**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023**



Sumber Data : BPS Kabupaten Probolinggo

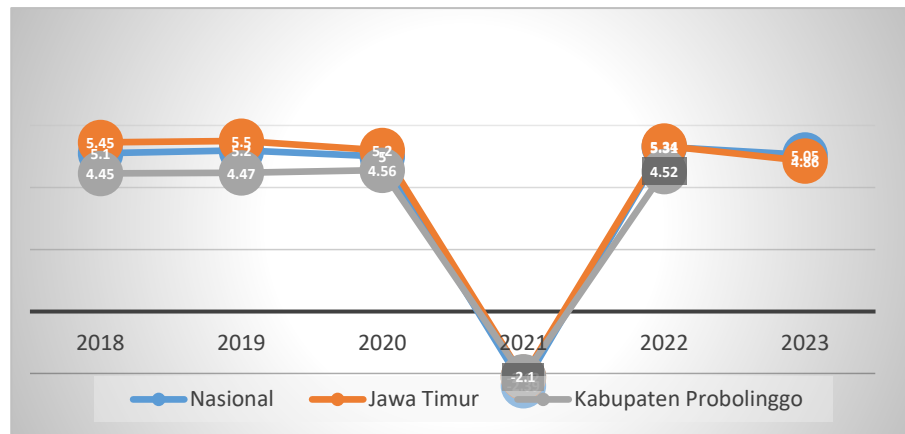
Mayoritas penduduk Kabupaten Probolinggo terdiri dari suku Madura dan Jawa yang mayoritas beragama Islam dan didukung banyaknya keberadaan sejumlah Pondok Pesantren yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Sukapura dan Sumber terdapat kelompok penduduk yang mempunyai sifat sosial dan budaya khas, yaitu suku Tengger dengan sebagian besar penduduknya beragama Hindu.



1.4.3 Kondisi Perekonomian Daerah

Setiap daerah memiliki potensi, kekhasan, dan tantangan yang berbeda dalam mengembangkan ekonominya. Faktor geografis, sumber daya alam, infrastruktur, demografi, serta kebijakan lokal merupakan beberapa variabel yang dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting untuk merancang strategi pertumbuhan yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki potensi yang unik dan peluang yang menjanjikan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Dengan lokasi yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta berbagai sektor potensial, Probolinggo memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tidak hanya memiliki dampak lokal, tetapi juga dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Melalui strategi yang tepat, seperti pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri, dan jasa, daerah ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memajukan kualitas hidup penduduknya. Faktor-faktor seperti investasi, inovasi, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi lokal memainkan peran penting dalam membentuk arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Selain itu, pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kab Probolinggo pada tahun 2022 berdasarkan tahun dasar 2010 mengalami peningkatan 6,62 poin menjadi 4,52% dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar -2,1%, sedangkan tahun 2020 yang berada di angka 4,56%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 16,51% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,76 persen. Untuk realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih dalam proses perhitungan BPS.

Langkah strategis pemerintah Kab Probolinggo guna menggerakkan laju perekonomian tahun 2023 melalui APBD Perubahan Tahun 2023 dengan merealisasikan belanja pembangunan sebesar Rp. Rp. 2.284.023.618.869,08 dari nilai penganggaran sebesar 2.580.062.958.743,- dengan capaian 88,87%, yang diarahkan untuk mewujudkan prioritas tema pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”**.



1.5. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah ditetapkan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu:

1. Sekretariat Daerah tipe B ;
2. Sekretariat DPRD tipe B ;
3. Inspektorat tipe A ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A ;
5. Dinas Kesehatan tipe A ;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A ;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B ;
8. Dinas Sosial tipe B ;
9. Dinas Tenaga Kerja tipe B ;
10. Dinas Perhubungan tipe B ;
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe B ;
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tipe A ;
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tipe B ;
14. Dinas Ketahanan Pangan tipe B ;
15. Dinas Pertanian tipe A ;
16. Dinas Perikanan tipe A ;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B ;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B ;
19. Dinas Lingkungan Hidup tipe A ;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B ;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B ;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tipe B ;
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B ;
24. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B.
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A ;



26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A;
27. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A ;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B ;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A ;
30. Kecamatan tipe B sejumlah 24 Kecamatan dan 5 Kelurahan ;
31. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Waluyojati dengan tipe B dan RSUD Tongas dengan tipe C ;
32. UPT sejumlah 48 unit kerja dengan rincian:
 - a. tipe A sebanyak 1 UPT;
 - b. tipe B sebanyak 13 UPT;
 - c. tipe D sebanyak 1 UPT; dan
 - d. 33 Puskesmas.

1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, Aparatur Sipil Negara/ASN berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berdasarkan data Simpeg Tahun 2023 sebanyak 9.099 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.323 orang dan perempuan sebanyak 4.776 orang.

Jumlah ASN berpendidikan terbesar adalah Strata 1 sejumlah 6.072 orang, terbesar ke 2 adalah Diploma sejumlah 1.313 orang, terbesar ke 3 adalah SMA/K/MA/ sederajat sebesar 859 orang, berikutnya adalah berpendidikan Strata 2 sebesar 780 orang, berpendidikan SMP dan SD sebesar 73 orang serta berpendidikan Strata 3 sejumlah 2 orang.

Tingginya Tingkat pendidikan ASN mempunyai peranan penting dalam menentukan jalannya roda pemerintahan yang efektif dan efisien, mensukseskan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.



Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD / Sederajat	19	4	23
2	SMP / Sederajat	41	9	50
3	SMA/K/MA/Sederajat	682	177	859
4	DIPLOMA I/II/III/IV	325	988	1.313
5	STRATA 1	2.806	3.266	6.072
6	STRATA 2	448	332	780
7	STRATA 3	2	0	2
8	DOKTER SPESIALIS	14	12	26
	JUMLAH	4.323	4.776	9.099

*Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Probolinggo*

1.6 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu strategis Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 tetap berdasarkan tema pembangunan terkait pasca pandemic covid-19 serta melalui telaah penajaman permasalahan dan isu provinsi, nasional hingga regional terhadap pelaksanaan capaian kinerja pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut:



- a. Masih kurangnya derajat kesehatan masyarakat dimasa pasca pandemi covid-19
- b. Merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- c. Masih rendahnya ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana
- d. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan masyarakat belum memadai
- e. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
- f. Dampak pandemic Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan
- g. Masih tingginya angka kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya
- h. Penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
- i. Rendahnya tingkat Ketahanan Pangan
- j. Rendahnya produksi dan daya saing sektor pertanian serta perkebunan
- k. Rendahnya produksi dan daya saing sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
- l. Pertumbuhan sektor Industri, Perdagangan dan UMKM, terutama untuk sektor potensial masih belum optimal
- m. Rendahnya nilai investasi daerah
- n. Ketersediaan sarana prasarana destinasi pariwisata sertifikasi kelembagaan pariwisata dan pemasaran serta pemanfaatan teknologi informasi belum memadai
- o. aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah masih belum optimal
- p. kecukupan air irigasi dan air baku melalui peningkatan pembangunan jaringan dan bangunan air lainnya belum memadai
- q. rendahnya kualitas kawasan pemukiman
- r. Ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum optimal
- s. Ketersediaan akses Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat belum memadai
- t. Pelestarian dan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup berkelanjutan belum optimal
- u. Penataan Gedung dan tata bangunan yang sesuai kelayakan dan fungsinya belum optimal



- v. pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang yang belum optimal
- w. ketersediaan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi yang belum optimal

Adapun penajaman dari perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023, terfokus pada :

1. Spesifikasi atas pemanfaatan pendanaan kembali ke sumber dana sebelumnya, sesuai regulasi yang mengatur di setiap K/L dan Provinsi, yaitu:
 - a. Program/Kegiatan DBHCHT
 - b. Dana Alokasi Khusus (Fisik/Non Fisik)
 - c. Dana Belanja BLUD / FKTP
 - d. Dana Bantuan Keuangan Khusus
 - e. Belanja lainnya, misalnya penambahan dana cadangan
2. Pendanaan atas belanja wajib dan sudah diantisipasi/diinventarisasi atas Kebutuhan anggaran, yaitu :
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dan Gaji PPPK
 - b. Dana Kegiatan POKIR yang tertunda tahun 2022
 - c. Pembayaran Pekerjaan IPAL 7 Unit PKM (TA. 2022)
3. Penguatan dukungan atas Program / kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023, yaitu :
 - a. Pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan ekonomi kreatif, yaitu :
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Dukungan terhadap pelaksanaan Perpres No. 80 Th 2019)
 - 2) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
 - 3) Peningkatan Pola Pangan Harapan,
 - 4) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
 - 5) Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah.
 - b. Meningkatkan Perlindungan sosial, kesempatan kerja, peran pemerintah dan lembaga desa untuk mengurangi angka kemiskinan



dan kesenjangan antar wilayah, yaitu :

- 1) Penguatan pada ketersediaan bantuan permakanan tanggap bencana pada urusan sosial
 - 2) Penyiapan implementasi Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan tata kelola kependudukan, yaitu :
- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, utamanya dalam kesiapan penyelenggaraan kurikulum merdeka belajar pada satuan Pendidikan;
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan Stunting, isu Aids, TBC dan Malaria.
- d. Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Dasar dan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat, yaitu :
- 1) Persiapan penanganan kawasan kumuh Desa Kalibuntu
 - 2) Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat miskin (RTLH dan air bersih)
 - 3) Persiapan pembangunan kawasan perkotaan Kraksaan (Stadion)
 - 4) Pengadaan sarana pendukung pemeliharaan jalan (alat berat)
- e. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Peningkatan monitoring pemantauan kualitas lingkungan (air dan udara)
 2. Peningkatan pembinaan pengelolaan persampahan pada masyarakat
- f. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan Tanggap Bencana, yaitu :
- 1) Meningkatkan intervensi kesiapsiagaan tanggap bencana
 - 2) meningkatkan upaya-upaya yang lebih intens dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat.



g. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu :

- 1) Penyusunan Dok. RPD tahun 2024 – 2025 dan Rancangan Teknokratik RPJPD 2025 - 2045
- 2) Akuisasi arsip atas penggabungan dan pemisahan perangkat daerah
- 3) Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Rencana Pembangunan Daerah Menengah yang tertuang dalam RPJMD bertujuan mewujudkan visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengalami perubahan RPJMD, dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023. Pada RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 ini, telah ada kesinambungan dengan RPJP, RPJM Nasional dan Provinsi, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai prinsip-prinsip pada Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis wajib disusun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan penerapan RPJMD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi ;
2. Memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan kinerjanya;



2.2. VISI DAN MISI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kab. Probolinggo Tahun 2018–2023, Visi Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Secara filosofi, visi memiliki makna yaitu :

1. Berakhlak Mulia : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dan santun dalam keragaman masyarakat.
2. Sejahtera : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat.
3. Berkeadilan : Diartikan tidak terjadi kesenjangan dan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.
4. Berdaya Saing : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas tinggi, sehingga mampu bersaing untuk menghasilkan output tertentu.

Adapun misi Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.



Untuk mewujudkan Misi 1 ini dijabarkan dalam 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum .
3. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

Perwujudan Misi 2 ini dijabarkan dalam 2 Tujuan dan 8 Sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat.

Tujuan 2 :

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan.

Sasaran :

1. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat.
2. Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatnya kemandirian desa..
4. Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk.
5. Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat.



Misi 3 : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan Misi 3 ini dijabarkan dalam 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sasaran :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang kapabel .
3. Pelayanan publik yang prima.

Misi 4: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan Misi 4 ini dijabarkan dalam 2 Tujuan dan 7 Sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sasaran :

1. Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisata.
2. Meningkatnya iklim investasi.
3. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan.
4. Meningkatnya ketahanan pangan.

Tujuan 2 :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah.
3. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.



TABEL 2.1
MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Misi		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing								
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.	I	Mewujudkan masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum	Indeks Ketenteraman Masyarakat	1	Meningkatnya toleransi antarumat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
					2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum
					3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	3	Indeks Ketahanan Daerah
2	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya	II	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	4	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca	4	Indeks Pendidikan
							5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Misi		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	manusia dan menurunkan angka kemiskinan.				5	Meningkatnya kualitas kesehatan	6	Indeks Kesehatan
					6	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Indeks Daya Beli
		III	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	8	Tingkat Kesempatan Kerja
				Tingkat Kemiskinan	8	Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial	9	Persentase Penurunan PPKS
					9	Meningkatnya kemandirian desa	10	Indeks Desa Membangun
					10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	11	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
				Indeks Pembangunan Gender	11	Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat	12	Indeks Pemberdayaan Gender



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Misi		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	IV	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	13	Nilai SAKIP
							14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					13	Birokrasi yang kapabel	15	Indeks SPBE
							16	Indeks Profesionalitas ASN
					14	Pelayanan publik yang prima	17	Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan	V	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi Koefisien Gini	15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisata	18	Indeks pembangunan ekonomi
					16	Meningkatnya iklim investasi	19	Persentase Realisasi Investasi



Misi		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					17	Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan	20	Nilai Tukar Petani
					18	Meningkatnya ketahanan pangan	21	Skor Pola Pangan Harapan
		VI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (IKLI + IKLH)	19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah	22	Indeks Pembangunan Infrastruktur
					20	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	23	Persentase Kawasan Permukiman Layak
							24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang
					21	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian/Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 yang dirancang untuk Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD tahun ke 5 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, dengan tema pembangunan tahun 2023 adalah **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”**.

Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Reformasi Birokrasi



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

4. Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan
5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi
6. Meningkatkan stabilitas Trantibbum

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 ini guna mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	
1	2	3	
1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		3	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelematan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penanggulangan Bencana
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Minat Bac	1	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Program Pengembangan Kurikulum
		3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Program Pengembangan Kebudayaan
		5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

		7	Program Pembinaan Perpustakaan
		8	Program Pengelolaan Arsip
		9	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
7	Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
8	Tertanganinya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	Program Pemberdayaan Sosia
		2	Program Rehabilitasi Sosial
		3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4	Program Penanganan Bencana
9	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Program Penataan Desa
		2	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		3	Program Administrasi Pemerintahan Desa
10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	1	Program Pengendalian Penduduk
		2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		3	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
11	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		3	Program Perlindungan Perempuan
		4	Program Perlindungan Khusus Anak
12	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

13	Birokrasi Yang Kapabel	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		5	Program Kepegawaian Daerah
		6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Pelayanan Publik Yang Prima	1	Program Pelayanan Penanaman Modal
		2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		3	Program Pendaftaran Penduduk
		4	Program Pencatatan Sipil
		5	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan
		6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Perdagangan, Serta Kepariwisata	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		7	Program Pengembangan Umkm
		8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		10	Program Pengembangan Ekspor
		11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		13	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

		15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		16	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
		18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		11	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
		12	Program Pemasaran Pariwisata
		13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		14	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		15	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		16	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		17	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		18	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		19	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		21	Program Pengembangan UMKM
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		23	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		24	Program Pengembangan Ekspor
16	Meningkatnya Iklim Investasi	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		2	Program Promosi Penanaman Modal
		3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
17	Meningkatnya Pendapatan Petani Dan Nelayan	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3	Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

		4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		5	Program Penyuluhan Pertanian
		6	Program Perizinan Usaha Pertanian
18	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		3	Program Penyelenggaraan Jalan
		4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		10	Program Penataan Bangunan Gedung
		11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		12	Program Penyelenggaraan Jalan
		13	Program Pengembangan Perumahan
		14	Program Kawasan Permukiman
		15	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		16	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		17	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		18	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

20	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Daerah	1	Program Pengembangan Perumahan
		2	Program Kawasan Permukiman
		3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		9	Program Penatagunaan Tanah
		10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		11	Program Penyelenggaraan Jalan
		12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		18	Program Penataan Bangunan Gedung
		19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		20	Program Penyelenggaraan Jalan
21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan



			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang terkait Dengan PPLH
		7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		10	Program Pengelolaan Persampahan

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pada dokumen PK memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja beserta dana, yang mengacu pada RPJMD, RKPD dan APBD.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bupati Probolinggo

Tujuan		Indikator Kinerja		Satuan	Target
I	<i>Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban sosial.</i>	A	<i>Indeks Ketentraman Masyarakat</i>	<i>Indeks</i>	<i>1,36</i>
Sasaran Strategis					
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,5
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1,05
3	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58
II	<i>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.</i>	B	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	<i>Indeks</i>	<i>67,83</i>
Sasaran Strategis					
4	Meningkatnya kualitas pendidikan dan Minat Baca	4	Indeks Pendidikan	Indeks	0.56
		5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14
5	Meningkatnya kualitas kesehatan.	6	Indeks Kesehatan	Indeks	0,76
6	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7	Indeks Daya Beli	Indeks	0,74
III	<i>Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pengentasan</i>	C	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	<i>%</i>	<i>2,75</i>



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

	<i>Kemiskinan.</i>	D	Tingkat Kemiskinan	%	16.21
		E	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,12
Sasaran Strategis					
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	8	Tingkat Kesempatan Kerja	%	93,81
8	Tertanganinya Permasalahan Kesejahteraan social	9	Persentase Penurunan PPKS	Indeks	3,47
9	Meningkatnya Kemandirian Desa	10	Indeks Membangun Desa	%	0,76
10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0,1
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	72,6
IV	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	F	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
Sasaran Strategis					
12	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	13	Nikai SAKIP	Nilai	83
		14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70-80
13	Birokrasi yang Kapabel	15	Indeks SPBE	Indeks	3,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63
14	Pelayanan Publik yang Prima	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84
V	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	G	Pertumbuhan ekonomi	%	3,67
		H	Koefisien Gini	Koefisien	0,36



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Sasaran Strategis					
15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Kepariwisata	18	Indeks Ekonomi Pembangunan	%	0,51
16	Meningkatnya iklim investasi	19	Persentase realisasi investasi	%	90,32
17	Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nelayan	20	Nilai Tukar Petani	Nilai	109,49
18	Meningkatnya Ketahanan Pangan	21	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	79,3
VI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	I	Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	63,85
Sasaran Strategis					
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	22	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	1,92
20	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	23	Persentase kawasan pemukiman layak	%	72,5
		24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	%	74,5
21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan daya tanggap bencana	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,75



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Tabel 2,4
Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Probolinggo

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
PENDIDIKAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	523,333,304,945,00	490,103,079,180,00	93,65%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	240,288,340,097,00	189,590,180,325,00	78,90%
3	Program Pengembangan Kurikulum	400,000,000,00	337,224,700,00	84,31%
4	Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	190,000,000,00	148,008,540,00	77,90%
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	36,561,000,00	31,251,800,00	85,48%
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	135,000,000,00	41,349,700,00	30,63%
7	Program Pengembangan Kebudayaan	710,000,000,00	628,995,827,00	88,59%
8	Program Pengembangan Kesenian tradisional	900,000,000,00	876,656,580,00	97,41%
9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan cagar Budaya	200,000,000,00	132,209,000,00	66,10%
10	Program Pengelolaan Permuseuman	20,000,000,00	7,360,000,00	36,80%
	Jumlah	766,213,206,042,00	681,896,315,652,00	89,00%
KESEHATAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1,039,409,594,726,00	892,808,328,066,16	85,90%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,956,162,502,00	139,160,670,238,00	83,35%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13,696,326,005,00	10,775,480,588,00	78,67%
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	450,115,000,00	322,626,630,00	71,68%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,215,719,571,00	976,122,935,00	80,29%
	Jumlah	1,221,727,917,804,00	1,044,043,228,457,16	85,46%
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	17,138,904,710,00	14,235,411,254,00	83,06%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8,026,762,100,00	4,961,847,504,00	61,82%
3	Program Penyelenggaraan Jalan	72,416,218,293,00	54,549,486,794,00	75,33%
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	277,000,000,00	275,100,652,00	99,31%
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,219,437,500,00	1,002,750,651,00	82,23%
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9,203,850,500,00	8,998,462,442,00	97,77%
7	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2,175,616,817,00	2,132,877,200,00	98,04%
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,903,608,000,00	8,691,412,823,00	97,62%
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1080,000,000,00	942,231,400,00	87,24%
10	Program Penataan Bangunan Gedung	4,125,000,000,00	3,583,001,784,00	86,86%
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4,645,000,000,00	4,068,148,700,00	87,58%
	Jumlah	129,211,397,920,00	103,440,731,204,00	80,06%
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6,749,140,428,00	5,890,903,643,00	87,28%
2	Program Pengembangan Perumahan	500,000,000,00	462,175,650,00	92,44%
3	Program Kawasan Permukiman	1,261,700,000,00	963,276,236,00	76,35%
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4,808,635,500,00	4,561,171,438,00	94,85%
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2,041,360,000,00	1,896,757,779,00	92,92%
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100,000,000,00	24,148,400,00	24,15%
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50,000,000,00	14,426,200,00	28,85%
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	150,000,000,00	117,078,000,00	78,05%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

9	Program Penatagunaan Tanah	200,000,000,00	134,372,747,00	67,19%
	Jumlah	15,860,835,928,00	14,064,310,093,00	88,67%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,033,919,132,00	2,919,738,587,00	96,24%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	439,285,300,00	399,545,300,00	90,95%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	25,755,552,200,00	25,736,353,062,00	99,93%
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33,384,000,00	32,280,000,00	96,69%
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	433,239,000,00	424,772,880,00	98,05%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	213,298,000,00	205,481,300,00	96,34%
	Jumlah	29,908,677,632	29,718,171,129	99,36%
SATPOL PP				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,862,648,653,00	16,208,801,544,00	96,12%
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,653,234,356,00	3,306,873,849,00	90,52%
3	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2,298,907,000,00	2,289,756,245,00	99,60%
	Jumlah	22,814,790,009,00	21,805,431,638,00	95,58%
SOSIAL				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,463,829,351,00	4,026,806,451,00	90,21%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

2	Program Pemberdayaan Sosial	497,272,500,00	484,761,600,00	97,48%
3	Program Rehabilitasi Sosial	2,204,377,900,00	2,134,580,200,00	96,83%
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	28,131,803,500,00	25,888,474,732,00	92,03%
5	Program Penanganan Bencana	83,351,000,00	55,875,800,00	67,04%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85,223,821,00	81,145,200,00	95,21%
	Jumlah	35,465,858,072,00	32,671,643,983,00	92,12%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
PERHUBUNGAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,735,939,817,00	26,759,869,376,00	96,48%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7,873,480,873,00	7,358,115,553,00	93,45%
3	Program Pengelolaan Pelayanan	92,282,500,00	90,870,400,00	98,47%
	Jumlah	35,701,703,190,00	34,208,855,329,00	95,82%
LINGKUNGAN HIDUP				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,674,985,564,00	15,009,571,719,00	95,75%
2	Program Perencanaan lingkungan Hidup	335,000,000,00	331,165,270,00	98,86%
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,092,500,000,00	898,468,596,00	82,24%
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	210,250,000,00	202,700,500,00	96,41%
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10,000,000,00	8,765,000,00	87,65%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	65,000,000,00	64,374,050,00	99,04%
7	Program Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum Adat (Mha), Kearifan lokal Dan Hak Mha Yang terkait Dengan Pplh	10,000,000,00	9,699,900,00	97,00%
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45,000,000,00	40,801,000,00	90,67%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20,000,000,00	18,731,900,00	93,66%
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25,000,000,00	24,506,000,00	98,02%
11	Program Pengelolaan Persampahan	3,311,140,000,00	3,289,870,401,00	99,36%
	Jumlah	20,798,875,564,00	19,898,654,336,00	95,67%
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,076,171,064,00	6,496,006,013,00	91,80%
2	Program Pendaftaran Penduduk	99,988,200,00	78,893,735,00	78,90%
3	Program Pencatatan Sipil	573,444,500,00	407,508,680,00	71,06%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	243,730,000,00	205,115,000,00	84,16%
	Jumlah	7,993,333,764,00	7,187,523,428,00	89,92%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,316,118,788,00	5,847,820,909,00	92,59%
2	Program Pengendalian Penduduk	412,342,975,00	392,462,765,00	95,18%
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7,946,450,325,00	6,575,622,267,00	82,75%
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5,954,400,000,00	5,829,380,000,00	97,90%
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	271,105,170,00	235,604,400,00	86,91%
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	99,341,630,00	98,953,000,00	99,61%
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	6,170,000,00	5,898,500,00	95,60%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	97,130,260,00	74,528,500,00	76,73%
9	Program Perlindungan Khusus Anak	108,251,440,00	101,700,800,00	93,95%
	Jumlah	21,211,310,588,00	19,161,971,141,00	90,34%
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	17,425,638,168,00	16,449,877,471,00	94,40%
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19,638,200,00	19,162,600,00	97,58%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	84,200,000,00	82,841,796,00	98,39%
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25,000,000,00	24,627,000,00	98,51%
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	109,600,000,00	107,802,170,00	98,36%
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	98,860,000,00	97,118,821,00	98,24%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	696,770,000,00	680,934,950,00	97,73%
8	Program Pengembangan UMKM	279,009,000,00	276,085,600,00	98,95%
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	863,132,288,00	847,736,934,00	98,22%
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	732,457,645,00	77,115,261,00	10,53%
11	Program Pengembangan Ekspor	80,004,650,00	79,597,797,00	99,49%
12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	132,360,000,00	132,108,956,00	99,81%
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	221,987,000,00	218,684,500,00	98,51%
14	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	14,267,113,714,00	11,947,169,398,00	83,74%
15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22,660,000,00	18,388,500,00	81,15%
16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	-	0,00%
	JUMLAH	35,058,430,665,00	31,059,251,754,00	88,59%
PENANAMAN MODAL (PMPTSP)				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,084,425,752,00	5,649,883,257,00	92,86%
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	279,270,000,00	256,768,123,00	91,94%
3	Program Promosi Penanaman Modal	100,050,000,00	97,574,950,00	97,53%
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	166,540,000,00	161,956,184,00	97,25%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350,800,000,00	250,819,150,00	71,50%
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35,440,000,00	34,256,631,00	96,66%
	Jumlah	7,016,525,752,00	6,451,258,295,00	91,94%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6,224,143,736,00	5,722,701,904,00	91,94%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	390,693,800,00	327,876,800,00	83,92%
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,982,027,800,00	4,842,679,377,00	97,20%
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750,000,000,00	750,000,000,00	100,00%
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,707,036,900,00	2,538,380,613,00	53,93%
7	Program Pemasaran Pariwisata	335,652,900,00	333,125,890,00	99,25%
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	68,080,200,00	63,456,100,00	93,21%
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1,310,092,000,00	1,150,188,266,00	87,79%
	Jumlah	18,767,727,336,00	15,728,408,950,00	83,81%
PERTANIAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,270,311,322,00	20,155,125,421,00	94,76%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8,434,803,829,00	7,484,159,906,00	88,73%
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,402,829,292,00	2,249,623,182,00	93,62%
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	408,626,000,00	389,476,790,00	95,31%
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,005,400,00	446,321,887,00	98,96%
6	Program Penyuluhan Pertanian	70,000,000, 00	67,319,300,00	96,17%
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	541,000,000,00	515,680,047,00	95,32%
	Jumlah	33,578,575,843,00	31,307,706,533,00	93,24%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,652,822,840,00	4,218,622,140,00	90,67%
2	Program Penataan Desa	45,000,000,00	44,287,700,00	98,42%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	55,000,000,00	54,523,300,00	99,13%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9,133,546,000,00	7,902,961,038,00	86,53%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,831,863,000,00	1,788,011,145,00	97,61%
	Jumlah	15,718,231,840,00	14,008,405,323,00	89,12%
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,019,694,448,00	4,482,341,756,00	89,30%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,227,911,800,00	1,160,869,255,00	94,54%
3	Program Aplikasi Informatika	3,384,155,996,00	3,296,657,972,00	97,41%
4	program penyelenggaraan statistik sektoral	112,706,400,00	79,561,000,00	70,59%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	81,207,500,00	52,855,000,00	65,09%
	Jumlah	9,825,676,144,00	9,072,284,983,00	92,33%
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,883,227,240,00	3,605,664,408,00	92,85%
2	Program Pembinaan Perpustakaan	918,864,050,00	858,434,966,00	93,42%
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	84,068,750,00	73,290,000,00	87,18%
4	Program Pengelolaan Arsip	518,212,900,00	501,242,400,00	96,73%
5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1,850,000,00	1,600,000,00	86,49%
6	Program Perizinan Penggunaan Arsip	1,147,500,00	-	0,00%
	Jumlah	5,407,370,440,00	5,040,231,774,00	93,21%
KEBENCANAAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,244,628,612,00	3,003,713,328,00	92,57%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

2	Program Penanggulangan Bencana	1,063,980,000,00	1,051,909,893,00	98,87%
	Jumlah	4,308,608,612,00	4,055,623,221,00	94,13%
TENAGA KERJA				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,813,583,872,00	5,479,506,227,00	99,44%
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,619,911,200,00	6,643,621,586,00	87,19%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	32,000,000,00	31,549,400,00	98,59%
4	Program Hubungan Industrial	49,980,000,00	49,694,000,00	99,43%
	Jumlah	13515475072,00	12,204,371,213,00	90,30%
URUSAN PILIHAN				
PERIKANAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,784,089,168,00	4,700,395,014,00	81,26%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	896,477,000,00	827,010,416,00	92,25%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	971,982,900,00	804,473,224,00	82,77%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	10,715,000,00	10,400,200,00	97,06%
5	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	333,460,100,00	316,810,598,00	95,01%
	JUMLAH	7,996,724,168,00	6,659,089,452,00	83,27%
KETAHANAN PANGAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,441,137,460,00	4,178,632,115,00	94,09%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	45,500,000,00	44,490,500,00	97,78%
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	867,479,976,00	811,822,735,00	93,58%
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	65,140,000,00	64,310,828,00	98,73%
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20,000,000,00	18,570,000,00	92,85%
	Jumlah	5,439,257,436,00	5,117,826,178,00	94,09%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

UNSUR PENUNJANG				
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,307,626,717,00	17,274,597,200,00	85,06%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,094,761,034,00	1,903,404,186,00	90,86%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,565,654,713,00	2,334,886,851,00	91,01%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,233,783,804,00	1,687,047,132,00	75,52%
	Jumlah	27,201,826,268,00	23,199,935,369,00	85,29%
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,926,937,386,00	8,143,471,696,00	91,22%
2	Program Kepegawaian Daerah	2,629,996,870,00	1,974,101,433,00	75,06%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,191,365,200,00	1,171,811,384,00	98,36%
	Jumlah	12,748,299,456,00	11,289,384,513,00	88,56%
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,097,512,088,00	6,543,392,079,00	92,19%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,083,259,700,00	1,011,438,888,00	93,37%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,948,969,907,00	1,862,108,157,00	95,54%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,214,162,000,00	1,180,318,320,00	97,21%
	Jumlah	11,343,903,695,00	10,597,257,444,00	93,42%
INSPEKTORAT DAERAH				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,476,750,480,00	10,752,904,023,00	93,69%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,385,094,780,00	1,278,301,202,00	92,29%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	536,054,100,00	475,840,875,00	88,77%
	Jumlah	13,397,899,360,00	12,507,046,100,00	93,35%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11,943,000,000.00	11,836,967,291,00	99.11%
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,588,895,358,00	2,368,505,440	91.49%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,869,556,044,00	30,813,373,536	93.74%
	Jumlah	47,401,451,402.00	45,018,846,267.00	94.97%
SEKRETARIAT DPRD				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,197,346,306,00	35,011,339,221,00	89.32%
2	program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	34,643,106,900,00	32,262,911,566,00	93.13%
	Jumlah	73,840,453,206,00	67,274,250,787,00	91.11%
KECAMATAN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64,679,053,708,00	60,097,445,781,00	92.92%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1,452,397,376,00	1,155,294,274,00	79.54%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10,296,747,199.00	9,406,717,180.00	91.36%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,119,799,327,00	981,013,340,00	87.61%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	945,685,100,00	870,970,800,00	92.10%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,109,800.00	18,060,000.00	94.51%
	Jumlah	10,315,856,999.00	9,424,777,180.00	91.36%



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Kepala Daerah / Bupati selaku pengemban amanah masyarakat, berkewajiban memberikan pertanggungjawaban melalui Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo 2018-2023, digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, alat monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk perbaikan kinerja mendatang.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan membandingkan target Rencana Kinerja dengan realisasinya, melalui koordinasi berbagai lembaga maupun lintas Lembaga, antara lain: Kementerian/Lembaga, BPS, Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dari perbandingan rencana/target dengan realisasi, akan diketahui gap kinerja, yang selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja tersebut, dianalisa dan dievaluasi



untuk menyusun strategi, program yang tepat guna meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan pencapaian kinerja yang akan datang.

Rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut :
Apabila semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya (positif),
atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya (negatif).

Rumus pendek :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kebalikan dari kondisi diatas, apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya (negatif), atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya (positif).

Rumus panjang :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - (\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Selanjutnya untuk kemudahan pemberian predikat terhadap kinerja yang telah dilakukan, digunakan kriteria penilaian berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja Tahun 2022

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja	Kode
Lebih dari 100%	Sangat Baik	
75 – 100%	Baik	
55 – 74 %	Cukup	
< 50 %	Kurang	

Secara umum Pemerintah Kabupaten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2023.

Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, sebagai berikut :

Tujuan 1.





LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

3

Rencana Strategis

Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

Indeks Ketahanan Daerah

Target:
0.58
Realisasi:
0.59

101.72%

Tujuan 2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

99,94%

Indeks Pembangunan Manusia

Target:
67,83
Realisasi:
67,79

4

Rencana Strategis

Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca

Indeks Pendidikan

Target:
0,56
Realisasi:
0,56

100%

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Target:
14
Realisasi:
12,67

90.50%

5

Rencana Strategis

Meningkatnya kualitas kesehatan

Indeks Kesehatan

Target:
0.76
Realisasi:
0.83

109,21%

6

Rencana Strategis

Meningkatnya daya beli masyarakat

Indeks Daya Beli

Target:
0.74
Realisasi:
0.75

101.35%

Tujuan 3.

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan

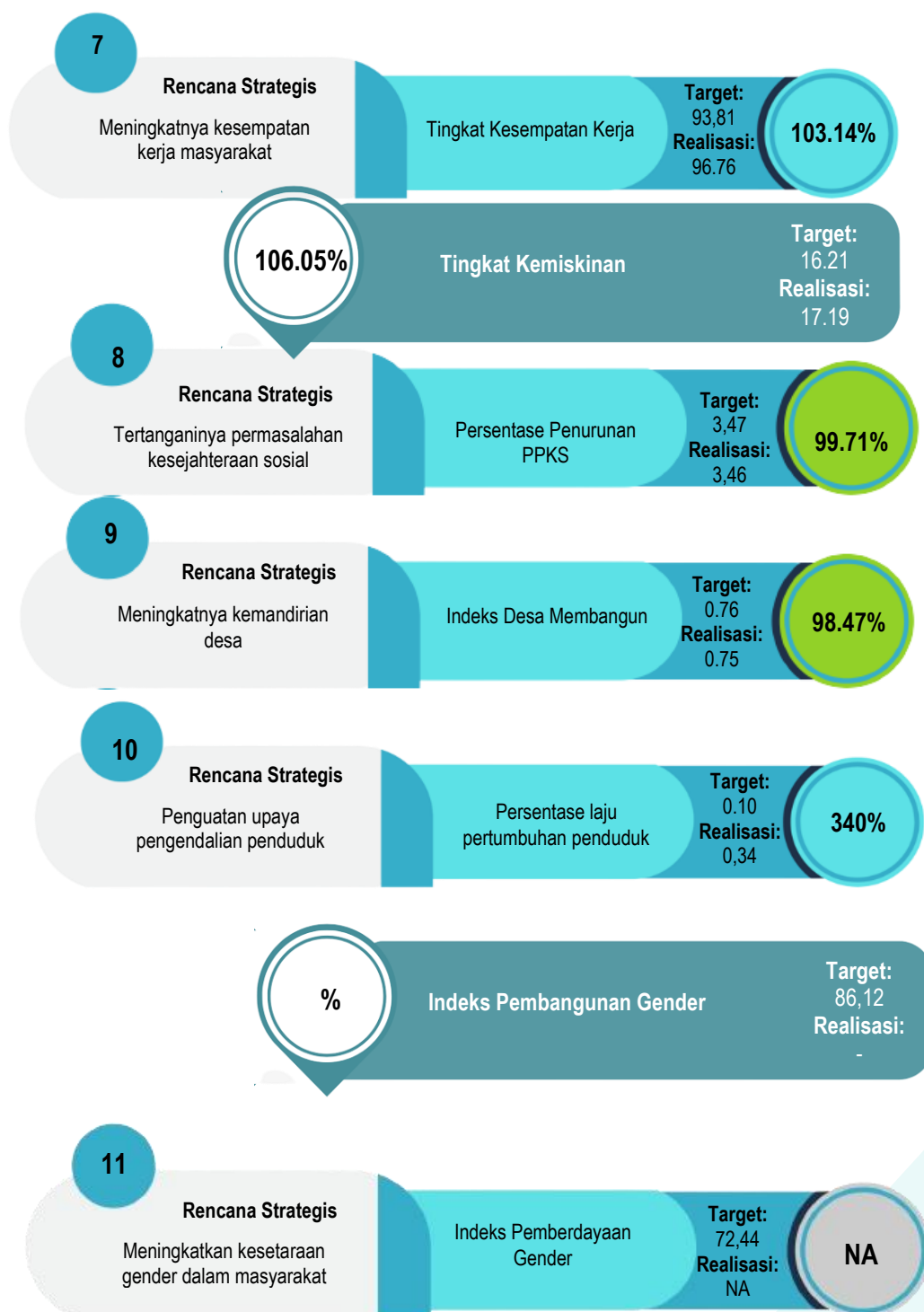
82,18%

Tingkat Pengangguran Terbuka

Target:
2.75
Realisasi:
3.24

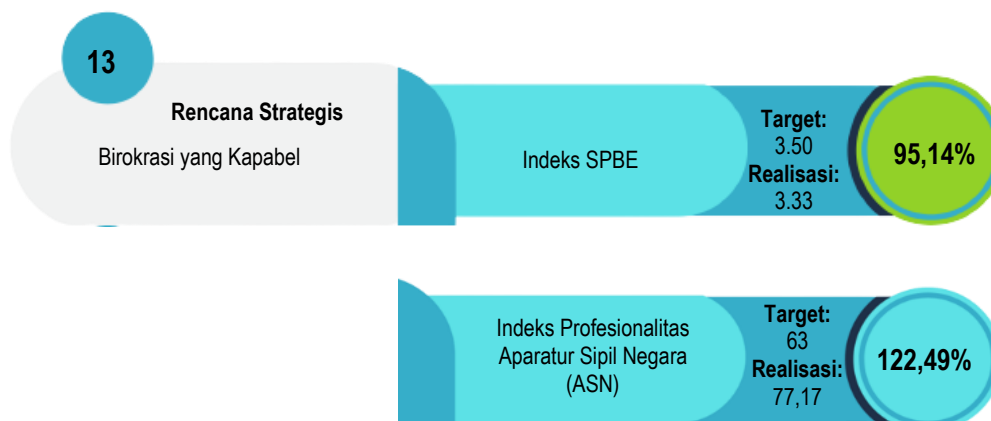


LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023





Tujuan 4.





LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Tujuan 5.



15

Rencana Strategis

Meningkatnya perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta kepariwisataan

Indeks Pembangunan Ekonomi

Target: 5.10
Realisasi: 6.53

128,04%

16

Rencana Strategis

Meningkatnya iklim investasi

Presentase Realisasi Investasi

Target: 90.32
Realisasi: NA

NA

111,11%

Koefisien Gini

Target: 0,36
Realisasi: 0,32

17

Rencana Strategis

Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan

Nilai Tukar Petani

Target: 109.49
Realisasi: 107.49

98,50%

18

Rencana Strategis

Meningkatnya Ketahanan Pangan

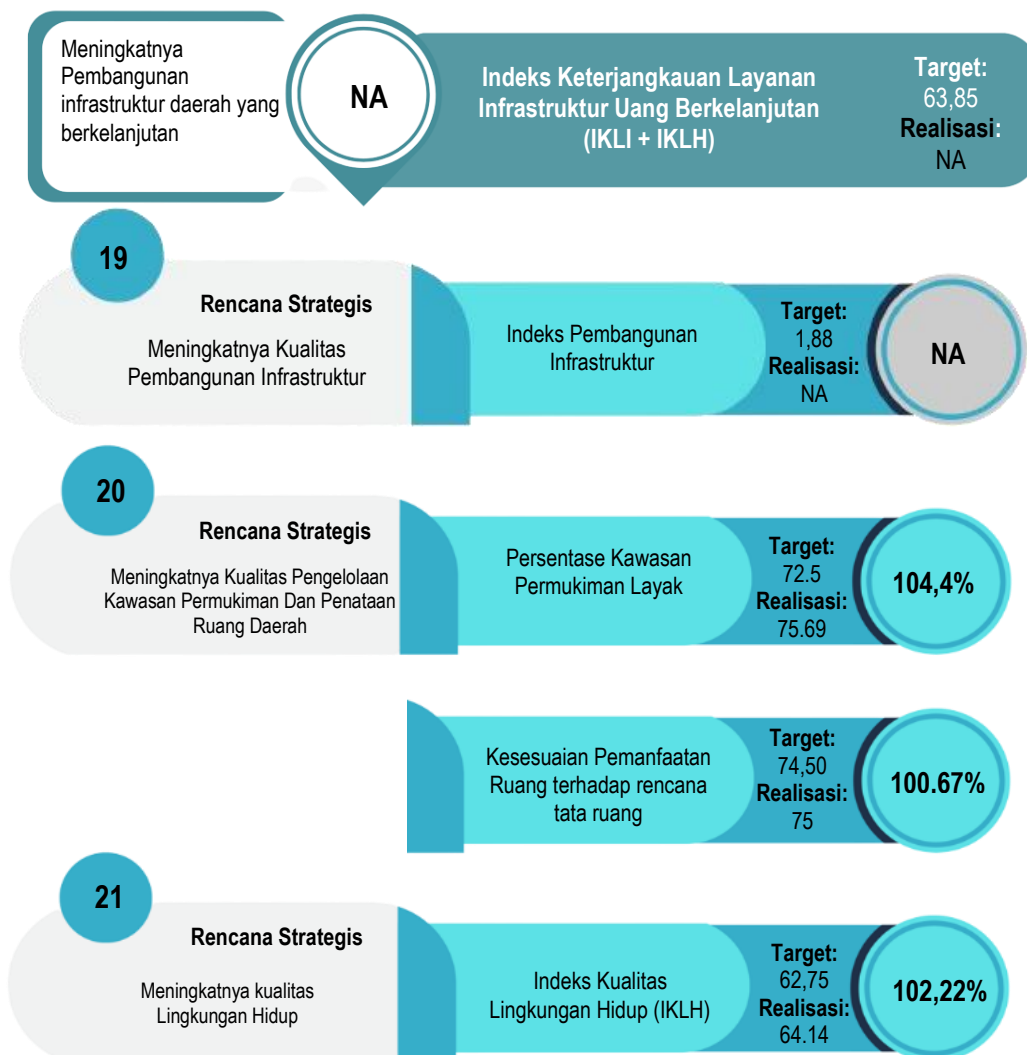
Skor Pola Pangan Harapan

Target: 79.30
Realisasi: 81.00

102,14%



Tujuan 6.

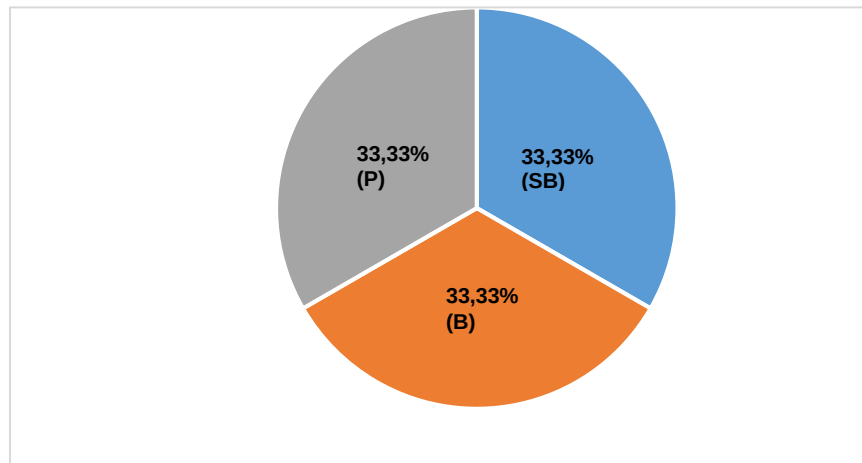


Ikhtisar Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022.

Sesuai perhitungan capaian kinerja diatas, dari 6 Tujuan dan 9 Indikator Kinerja Tujuan, diperoleh hasil sebagai berikut :

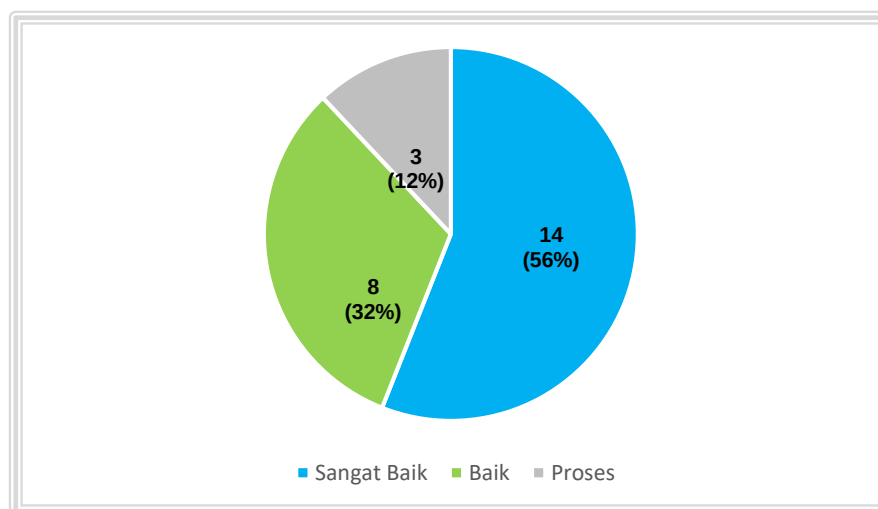
- Capaian kinerja tujuan dengan kriteria sangat baik sejumlah 3 Indikator atau 33,33 %.
- Capaian kinerja tujuan dengan capaian kriteria baik sejumlah 3 indikator atau 33,33 %.

- c. Capaian kinerja tujuan masih dalam proses perhitungan sejumlah 3 indikator atau 33,33 %.



Sedangkan capaian indikator kinerja 21 Sasaran strategis dan 25 indikator kinerja Sasaran, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran dengan kriteria sangat baik sejumlah 14 Indikator atau 56 %.
- Capaian kinerja sasaran dengan capaian kriteria baik sejumlah 8 indikator atau 32 %.
- Capaian kinerja sasaran masih dalam proses perhitungan sejumlah 3 indikator atau 12 %.





3.2. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA TAHUNAN 2023

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Misi Ke - 1
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia
melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan
toleran.

Misi ke 1 diwujudkan dengan 1 tujuan dan 3 sasaran, sebagaimana tabel berikut :



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke-satu dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
I	Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum	A	Indeks Ketentraman Masyarakat	Indeks	-	-	-	0	2.93	2.72	1.36	200.00	BAPPELITBANG DA
Sasaran Strategis													
1	Meningkatnya toleransi antarumat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73.5	71.5	76.67	77.06	78.02	78.12	76.5	102.12	Bakesbangpol, Satpol PP, Bappelitbangda
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	1	0.56	8.3	2.12	1.89	1.32	1.05	125.71	Satpol PP, Bappelitbangda
3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	3	Indeks Ketahanan Daerah	Persentase	-	-	-	-	0.60	0.59	0.58	101.72	BPBD

Sumber : Data BPS dan Hasil Pengolahan PD terkait



Analisa realisasi kinerja Tujuan I pada tabel 3.2 yaitu **“Mewujudkan masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum”** dengan indikator Indeks Ketentraman Masyarakat. Indikator ini merupakan indikator baru pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dengan penanggungjawab perhitungan Bapelitbangda.

Tujuan I terdiri atas 3 sasaran strategis dengan indikator pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya toleransi antar umat beragama”.

Sebagaimana Tabel 3.2, target Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 sebesar 76,5 terealisasi 78,12 atau capaian kinerjanya sebesar 102,12% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Probolinggo tahun 2023 antara lain :

- a. Pemkab telah memfasilitasi penutupan yang diduga petilasan Syekh Maulana Ishaq bertempat didesa Kalianan Kecamatan Krucil. Dari hasil Rapat Koordinasi FKUB berdasarkan fakta dan saksi menyatakan bahwa tempat tersebut tidak ada hubungan dengan Syekh Maulana Ishaq, dimana sebelumnya telah ditemukan pemanfaatan tempat tersebut oleh kelompok tertentu untuk menggelar kegiatan keagamaan. Selanjutnya, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak terkait telah menutup tempat petilasan tersebut.
- b. Beberapa kegiatan yang diadakan pemerintah kabupaten dengan melibatkan masyarakat dari berbagai penganut keagamaan antara lain Tasyakuran dan resepsi 1 Abad NU, Kirab Panji dan Jalan Sehat serta petik laut

2. Sasaran “Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum”.

Berdasarkan hasil penghitungan dari Satpol PP Kabupaten Probolinggo sebagaimana pada Tabel 3.2, menunjukkan bahwa persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 sebesar 1,32% dari target 1,05% dengan capaian realisasi sebesar 125,71% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan permasalahan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain :

- a. Belum adanya regulasi (Perda/Perkada) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Masih banyak dijumpai pelanggaran cukai rokok pada industri rumahan yang memproduksi rokok di Kab Probolinggo hal ini disebabkan Kab Probolinggo termasuk daerah penghasil tembakau terbesar di Jatim.
- c. Kurangnya jumlah tenaga yang berkualifikasi dalam pelaksanaan tugas fungsi di Bakesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya PPNS, pelayanan pemadaman dan pengendalian kebakaran.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Probolinggo dalam rangka penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- a. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, dimana progress s/d saat ini draf Perda dalam pengajuan rekomendasi Biro Hukum Provinsi Jatim dan persetujuan Mendagri yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Perkada.
- b. Koordinasi antar lintas sektoral dalam penanganan pelanggaran cukai dan operasi penegakan peraturan khususnya pelanggaran cukai rokok serta meningkatkan sosialisasi peraturan tentang cukai rokok pada masyarakat bekerjasama dengan Bea Cukai perwakilan probolinggo.
- c. Peningkatan kompetensi pegawai dan penambahan jumlah pegawai yang memenuhi Standart Kompetensi di Satpol PP.



3. Sasaran “Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana”.

Berdasarkan hasil penghitungan Indek Ketahanan Daerah tahun 2023 yang dilakukan BPBD Provinsi Jatim, dari target 0,58 terealisasi 0,59 dengan capaian kinerja 101,72% berkategori **Sangat Baik**.

Permasalahan-permasalahan terkait ketahanan daerah dalam menghadapi bencana di Kabupaten Probolinggo antara lain:

- a. Terbatasnya Keberadaan aturan/mekanisme dalam mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana misalnya terkait Kelembagaan BPBD/FPRB/Desiminasi informasi bencana dll.
- b. Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di daerah belum berjalan secara optimal.
- c. Pengembangan kapasitas pendukung dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih bersifat minim. Misalnya terkait sertifikasi keahlian, desiminasi informasi, fungsi Pusdalops PB, Pelatihan dan Pendidikan terkait Penanggulangan Bencana
- d. Integrasi program/kegiatan antar OPD dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum terlaksana secara terpadu. Misalnya dalam beberapa kegiatan penanggulangan bencana belum terlaksana secara kolaborasi dan sinergi.
- e. Efektivitas kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana masih belum berjalan secara efektif dan efisien.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan layanan sub urusan kebencanaan antara lain :

- a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan melalui :
 - 1) Penguatan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (sudah ada dan perlu direvisi)
 - 2) Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan



- 3) Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Resiko Bencana untuk Pengurangan Resiko Bencana
- b. Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu melalui :
 - 1) Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - 2) Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - 3) Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - 4) Penyusunan Peta Risiko dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - 5) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
 - 1) Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
 - 2) Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan/Desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
 - 3) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana melalui Lintas Lembaga
 - 4) Penguatan Pusdalops PB (Penanggulangan Bencana)
 - 5) Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
 - 6) Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
 - 7) Penyelenggaraann Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
 - 8) Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
 - 9) Pengadaan Peralatan dan Sarpras Kebencanaan



- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana melalui :
 - 1) Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataaan Ruang Daerah
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
 - 3) Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana Pembentukan TRC multisektor
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi dengan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

Strategi peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2024 antara lain :

- a. penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana periode 2024-2028 untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah.
- b. Pengadaan rambu-rambu bencana sebagai upaya peningkatan mitigasi bencana di fasilitas umum.

Misi Ke - 2

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan

Untuk mewujudkan Misi ke 2, dilakukan melalui 2 Tujuan dan 4 Sasaran sebagai berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 2 dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
II	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	B	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65.16	65.6	66.07	66.26	66.96	67.79	67.83	99.94	Diskominfo dan Stansa, BPS
Sasaran Strategis													
4	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca	4	Indeks Pendidikan	Indeks	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	-	10.67	12.6	12.67	14	90.50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Meningkatnya kualitas kesehatan	6	Indeks Kesehatan	Indeks	0.72	0.72	0.73	0.729	0.73	0.83	0.76	109.21	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Indeks Daya Beli	Indeks	-	-	-	-	0.74	0.75	0.74	101.35	Dinas KUPP

Sumber : BPS dan Hasil Penilaian ANRI



Analisa realisasi kinerja Tujuan II pada tabel 3.3 yaitu "**Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**" dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 67,83, terealisasi 67,79 atau capaian kinerjanya 99,94%.

Tabel 3.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab Probolinggo
Provinsi Jatim dan Nasional Tahun 2018-2022

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	SATUAN	REALISASI TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 NASIONAL	%	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,77
2 PROVINSI JAWA TIMUR	%	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75	74,65
3 KABUPATEN PROBOLINGGO	%	64,85	65,6	66,07	66,26	66,96	67,79

Apabila dibandingkan dengan realisasi IPM tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Tabel 3.4, IPM Kab Probolinggo masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jatim meskipun tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga diperlukan akselerasi peningkatan IPM melalui peningkatan Indeks Pendidikan (HLS dan RLS), Indeks Kesehatan (AHH) dan Daya Beli (pengeluaran per-kapita riil).

Tujuan II terdiri dari 3 sasaran strategis dengan indikator pencapaian sebagai berikut :

4. Sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca".

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Minat Baca" diukur dengan **Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**.

4.1. Indeks Pendidikan

Tahun 2023 Indeks pendidikan Kab Probolinggo ditetapkan target sebesar 0,56; terealisasi 0,56 atau capaian kinerjanya 100 % dan masuk kategori capaian **Baik**. Apabila dibandingkan dengan target



kinerja pada akhir RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 sudah tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya PAUD dan Pendidikan Non formal / Kesetaraan.
- b. Belum meratanya akses pendidikan yang bermutu terutama di daerah tertinggal dan disparitas mutu antar satuan pendidikan
- c. Kondisi ekonomi berdampak pada putusnya akses pendidikan anak dan akses ke jenjang yang lebih tinggi
- d. Kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal belum maksimal, dikarenakan belum terlaksananya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya lokal secara optimal, kurangnya pembinaan dan motivasi terhadap pelaku seni dan budaya, belum optimalnya fungsi kelembagaan kelompok seni budaya dalam mengakomodir kebutuhan kelompok-kelompok seni budaya yang ada dan belum terlaksananya pengembangan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional secara optimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- a. 1). Mengoptimalkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS,BOP,BOPDA) pada Satuan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan
- 2). Mengoptimalkan Program Indonesia Pintar sebagai bantuan personil peserta didik dalam pemenuhan pelengkapan dasar siswa miskin
- 3). Melibatkan komunitas lokal dalam mendukung program pendidikan dengan melibatkan organisasi fungsi pendidikan (PGRI,GOPTKI,IGTKI, HIMPAUDI,APSI, MKKS, K3S, MGMP, dan Dewan pendidikan) dalam bentuk kegiatan koordinasi dan evaluasi di masing-masing wilayah.



- b. 1). Melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan melalui kegiatan rehab dan pembangunan sarpras utilitas sekolah pada 90 satuan pendidikan
- 2). Mengembangkan kompetensi guru dengan bimtek Implementasi Kumer, Bimtek Perencanaan berbasis data (PBD) telah dilaksanakan 50 kegiatan
- c. 1). Meningkatkan program transportasi sekolah gratis atau subsidi transportasi bagi siswa prioritas keluarga miskin melalui banguan transportasi OASe (Ojek anak sekolah) untuk 82 anak sekolah
- 2). Mengoptimalkan program pendidikan berbasis vokasi bagi keluarga miskin untuk 102 PKBM
- d. Mengoptimalkan pemajuan kebudayaan lokal guna peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indeks pendidikan antara lain :

- a. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, Desa dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan strategi yang holistik yaitu : 1. mandatori dana desa untuk meningkatkan HLS RLS (untuk pembiayaan anak tidak sekolah, Bantuan Operasional PAUD) 2. Kerjasama dengan BAZNAS dengan kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Warga Belajar Kesetaraan
- b. Alokasi Anggaran Peningkatan sarana prasarana dan kualitas dalam pembelajaran
- c. Program sertifikasi guru
- d. Kebijakan bantuan Transportasi sekolah gratis atau subsidi transportasi bagi siswa prioritas keluarga miskin
- e. Pendidikan berbasis vokasi bagi keluarga miskin
- f. Beberapa inovasi antara lain Inovasi Bela Sang Raja dan Inovasi



KESIT (Kepala Sekolah Inspiratif, Inovatif, berprestasi) untuk menggerakkan kepala sekolah dan guru penggerak membangun inovasi di masing-masing satuan pendidikan.

4.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Indikator kedua sasaran ke 4 yaitu **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** yang pada tahun 2023 ditargetkan 14 terealisasi sebesar 12,67 dengan capaian 90,50% kategori capaian kinerja **Baik**.

Perhitungan IPLM berdasarkan pada penilaian enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi keuangan, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta literasi budaya dan kewarganegaraan

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Masih rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan literasi.
- b. Kurangnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dan stakeholder lainnya di bidang literasi.
- c. Rendahnya tata kelola arsip di PD dan desa dan kurangnya SDM arsiparis yang kompeten.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut:

- a.
 - 1) Meningkatkan layanan perpustakaan melalui menciptakan perpustakaan yang nyaman, buku-buku yang lebih beragam dan petugas layanan yang ramah.
 - 2) Mengaktifkan perpustakaan keliling dengan tujuan ke desa-desa dan sekolah dengan fasilitas bahan/buku bacaan dan wifi.
 - 3) Memfasilitasi masyarakat untuk menambah informasi dan pelatihan-pelatihan daring.



- b. Peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dan stakeholder di bidang literasi, antara lain dengan kegiatan: Bedah buku, pameran dan penjualan buku murah dll.
- c. Melakukan pendampingan Perangkat Daerah terkait tata kelola arsip dan penerapan SRIKANDI sebagai aplikasi penunjang transformasi arsip digital di seluruh PD.

5. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”.

“Meningkatnya Kualitas Kesehatan” diukur dengan indikator Indeks Kesehatan, ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 0,76 terealisasi 0,83; tercapai kinerjanya 109,21% atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Pada tahun 2023 kebijakan kesehatan difokuskan pada penanganan stunting, penurunan AKI/AKB serta penanganan penyakit menular dan tidak menular dengan capaian indek kesehatan sebesar 109,21% namun masih ditemukan beberapa hambatan diantaranya :

- a. Kurangnya Akses Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak Belum Optimal
- c. Peningkatan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- d. Masih rendahnya kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat

Adapun Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian target indeks Kesehatan tahun 2023 yaitu :

- a. Pemenuhan Peningkatan Kualitas Saranan dan Prasarana Fasilitas Kesehatan :
 - 1). Rehabilitasi Puskesmas (Condong, Krejengan, Pakuniran)
 - 2). Rehabilitasi Labkesda dan akreditasi “Paripurna” Labkesda
 - 3). Penyediaan Ambulance Puskesmas Tegalsiwalan, Pustu Wonotoro, Puskesmas Suko
 - 4). Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah di Puskesmas
 - 5). Pengadaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan



- 6). Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
- 7). Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pelatihan Keselamatan Pasien, Konseling Menyusui, SDIDTK, Surveilans PD3I, PKMN, Pelatihan USG, MTBS).
- b. 1). Pendampingan Ibu Hamil Resti
- 2). Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
- 3). Pemberian Susu pada Ibu Hamil Kontak Pertama dengan Petugas Kesehatan pada Trib 1
- 4). Pelaksanaan triple eliminasi pada Bumil
- 5). Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu
- c. 1). Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Pelayan Masyarakat
- 2). Pemeriksaan IVA dan Sadanis
- 3). Pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK)
- 4). Intensifikasi penemuan terduga TBC di tempat khusus
- 5). SKRINING HEPATITIS
- 6). Pemberian Makanan Tambahan penderita TBC
- 7). Pembinaan Teknis dalam Penguatan Gerakan 1 Rumah 1 jumatik
- 8). Gerakan mendukung pengendalian penyakit menular prioritas (TBC)
- 9). Fogging Fokus DBD
- 10). Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi , Pendampingan Teknis Imunisasi
- d. 1). Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)
- 2). Orientasi keamanan pangan dan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
- 3). Pengadaan Jamban Layak
- 4). Inspeksi Kesehatan Lingkungan
- 5). Kampanye 5 pilar STBM & Pembuatan PERDES Larangan BAB



sembarangan

Regulasi pendukung kebijakan bidang kesehatan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

6. Sasaran “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”.

“Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” diukur dengan Indeks Daya Beli, ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 0,74; terealisasi sebesar 0,74; capaian kinerjanya 100% atau kategori capaian **Baik**.

Daya Beli Masyarakat dipengaruhi tingkat konsumsi, harga, pendapatan, dan tingkat inflasi. Masyarakat dengan penghasilan rendah akan cenderung mengkonsumsi produk dengan harga yang relative murah dan jumlah yang lebih sedikit serta sebaliknya. Progres inflasi Kabupaten Probolinggo mengikuti data inflasi Kota Probolinggo, dimana tahun tahun 2020 inflasi sebesar 1,88, tahun 2021 sebesar 1,76 , tahun 2022 meningkat menjadi 5,45 dan turun drastis di tahun 2023 sebesar 2,86 penurunannya dipengaruhi ketersediaan bahan makanan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Adapun strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat yaitu :

- a. Adanya kebijakan bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.



- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan bagi UKM dan pelaku ekonomi kreatif serta penyelenggaraan pameran-pameran yang menjual produk UKM dan pelaku ekonomi kreatif
- c. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam mengendalikan inflasi melalui sidak harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di beberapa pasar dan pasar murah
- d. Multi Level Meeting dengan mengikutsertakan stakeholder terkait untuk memecahkan permasalahan penyebab inflasi di daerah.

Tujuan III **“Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan”** terdiri dari 3 indikator tujuan dan 5 sasaran strategis dengan indikator pencapaian sebagai berikut :



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 3 dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
III	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan	C	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,15	3,88	4,86	4,55	3.25	3.24	2.75	82,18	Diskominfo Stansa dan BPS
		D	Tingkat Kemiskinan	Persentase	18,71	17,76	18,61	18,91	17.12	17.19	16.21	93.95	Diskominfo Stansa dan BPS
		E	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	-	85.39	-	86.12	-	BPS
Sasaran Strategis													
7	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	8	Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase	-	-	-	-	96.75	96.76	93.81	103.14	Disnaker



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

8	Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial	9	Persentase Penurunan PPKS	Persentase	-	-	-	-	-	3.46	3.47	99.71	Dinsos
9	Meningkatnya kemandirian desa	10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,63	0,68	0,7	0,7128	0.73	0.75	0.76	98.47	DPMD
10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	11	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,6	0,55	0,63	0,1	0,1	0.34	0.1	340.00	DP3AP2KB/BPS
11	Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat	12	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase	65,86	64,9	68,69	66,96	-	-	72.6	-	DP3AP2KB/BPS



Analisa realisasi kinerja Tujuan III pada tabel 3.5 diatas, 3 indikator tujuan yaitu Persentase tingkat Pengangguran terbuka, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pemberdayaan Gender.

A. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Indikator tujuan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,75%, terealisasi 3,25% dengan capaian 91,7%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD-P sebesar 2.75%, maka capaiannya sebesar 116,66%. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 3.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2023

TPT		SATUAN	REALISASI TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	NASIONAL	%	5,34	5,01	7,07	6,49	5,86	5,32
2	PROVINSI JAWA TIMUR	%	3,99	3,92	2,02	5,74	5,49	4,88
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	%	4,15	3,88	4,86	4,55	3,25	3,24

**Sumber : Data BPS tahun 2023*

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kab Probolinggo pada tahun 2023 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. TPT di Kab Probolinggo selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan, dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022.



Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja TPT diantaranya :

- a. Pembangunan Proyek Strategis Nasional / Tol PasPro dan Probwangi mulai tahun 2021 s/d saat ini berdampak pada peningkatan investasi. Selain dari Perusahaan dan pelaku usaha baru, pengerjaan pembangunan proyek tol ikut serta menyerap tenaga kerja formal/informal di wilayah Kabupaten Probolinggo.
- b. Kerjasama dengan beberapa perusahaan (Misal: Bee Jay Sea Food, Perusahaan garment) dalam hal penerimaan kerja bagi peserta program pelatihan kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja
- c. Kegiatan Car Free Day yang semakin meningkat pelaksanaannya di Alun-alun Kraksaan semakin memacu enterprener (perseorangan maupun kelompok) untuk berwirausaha terbukti dengan bertambahnya jumlah peserta Car Free Day.
- d. Meningkatkan pelatihan online dengan jenis pelatihan yang disesuaikan kebutuhan perusahaan dengan sasaran masyarakat dan siswa yang akan lulus sekolah.
- e. Monitoring evaluasi secara berkala oleh Dinas Tenaga Kerja pada perusahaan-perusahaan swasta untuk memantau ketertiban pelaksanaan aturan ketenagakerjaan guna meminimalisir konflik antara pihak Perusahaan dan karyawannya



B. Tingkat Kemiskinan

Target indikator tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 16,21%, terealisasi 17,19% dengan capaian 93,95 dengan kategori **Baik**.

Tabel 3.7

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

PENDUDUK MISKIN		SATUAN	REALISASI TAHUN					2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	NASIONAL	%	9,66	9,41	9,78	10,14	9,57	9,36
2	PROVINSI JAWA TIMUR	%	10,98	10,37	11,09	11,4	10,49	10,35
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	%	18,71	17,76	18,61	18,91	17,12	17,19

**Sumber : Data BPS per- September 2022*

Dari Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2018 s/d 2023 mengalami fluktuasi, dan masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kab. Probolinggo sedikit naik sebesar 0,07.

Sejak tahun 2021 Kab Probolinggo ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dilakukan tiga strategi pengentasan kemiskinan ekstrem pada:

- Program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi serta jaminan sosial.
- Program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, pengembangan ekonomi lokal dan akses pekerjaan .
- Program/kegiatan dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektifitas antar wilayah.



Hasil inventarisasi realiasi program penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Probolinggo tahun 2023 sesuai dengan **tagging** Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Stranas PK) sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Inventarisasi Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim
Kabupaten Probolinggo Tahun 2023**

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI
1	BPBD	853.980.000	792.487.240
2	Dinas Kependudukan dan Capil	75.553.200	62.634.550
3	Dinas Kesehatan	59.511.762.500	50.032.476.211
4	Dinas Ketahanan Pangan	176.619.976	822.955.235
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.181.612.089	145.887.808.812
6	Dinas Perhubungan	100.871.883	93.321.452
7	Dinas Perikanan	1.069.785.900	1.659.386.222
8	Dinas Perpustakaan	55.544.050	36.758.838
9	Dinas Pertanian	9.972.791.229	8.868.994.962
10	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20.609.307.200	19.840.621.031
11	Dinas PMD	7.346.659.000	6.468.395.971
12	Dinas PUPR	2.203.551.660	1.985.021.358
13	Dinas Sosial	29.403.698.700	28.044.963.432
14	Dinas Tenaga Kerja	7.419.891.200	6.464.876.886
15	DKUPP	279.009.000	276.085.600
16	DP3AP2KB	141.124.460	80.427.000
	Grand Total	295.401.762.047	271.417.214.800

Dari tabel 3.8 diatas, total alokasi anggaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2023 sebesar **Rp.295.401.762.047,-** bersumber dana dari APBD Kabupaten, terealisasi **Rp.271.417.214.800,-** dengan capaian sebesar **91,88 %**. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo didukung/*support* oleh sistem aplikasi SASMITA (Sistem Analisa Kemiskinan Terpadu Daerah) sebagai sistem integrasi data anggaran dan program penanggulangan kemiskinan serta data masyarakat miskin penerima program bantuan sosial. Menindaklanjuti



Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berikut pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh 16 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain :

1. Pembangunan Sarpras dan utilitas sekolah
2. Rehabilitasi sedang/berat sarpras, utilitas sekolah dan ruang kelas
3. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar dan SMP
4. Pengelolaan dana BOP PAUD
5. Penyelenggaraan proses belajar dan pengelolaan dana BOP non formal/kesetaraan
6. Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan Kesehatan balita
7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa berat
8. Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi orang terduga TB, resiko terinfeksi HIV, jiwa dan NAPZA
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC)
10. Peningkatan kemampuan potensi sumber kessos keluarga, kelembagaan Masyarakat
11. Pemberian bimbingan social kepada keluarga PMKS
12. Pendataan fakir miskin
13. Fasilitasi bansos kesejahteraan keluarga, pengembangan ekonomi Masyarakat dan penyediaan makanan bagi maskin
14. Pembangunan SPAM dan sub sistem pengolahan setempat
15. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
16. Penyusunan Site plan dan DES Peremajaan /pemugaran permukiman kumuh serta Pembangunan RTLH
17. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja serta perluasan kesempatan kerja



18. Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
19. Pengadaan Cadangan pangan
20. pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
21. Fasilitasi Kerjasama antar desa, penyelenggaraan administrasi pemdes, penyusunan perencanaan Pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan asset serta pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan pemdes
22. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
23. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat
24. Pengembangan kapasitas nelayan dan pemberian fasilitasi bagi pelaku UMKM perikanan
25. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
26. Penjaminan ketersediaan sarpras pembudidayaan ikan
27. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
28. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
29. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
30. Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain
31. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani serta prasarana pertanian lainnya
32. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman



pangan, hortikultura, dan Perkebunan

33. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec dan desa
34. Penyediaan data gender dan anak
35. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha
36. Membentuk rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain
37. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota
38. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
39. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
40. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
41. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
42. Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
43. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
44. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil
45. Kerja sama pemanfaatan data kependudukan

C. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tahun 2023 IPG ditargetkan 86,12 namun s/d penyusunan laporan ini masih dalam proses perhitungan BPS. IPG merupakan indikator ukur ketimpangan atau kesenjangan pembangunan manusia khususnya terkait gender. Jika nilai IPG semakin mendekati 100, maka



kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin sempurna.

Perwujudan tujuan III “**Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan**” dicapai melalui 5 sasaran strategis sebagai berikut :

7. Sasaran “Meningkatkan Kesempatan Kerja”

Sasaran ketujuh diukur dengan indikator **Tingkat Kesempatan Kerja** yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 93,81, dengan realisasi sebesar 96,76, capaian kinerjanya 103,14% dengan kategori capaian **Sangat Baik**. Data tingkat Kesempatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023 yang dilaksanakan di Bulan Agustus.

Hal-hal yang mempengaruhi ketercapaian target indikator tingkat kesempatan kerja yaitu:

- a. Ketersediaan tenaga kerja usia produktif.
- b. Pelaksanaan proyek strategis Nasional.
- c. Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dengan Perusahaan tentang Kerjasama penempatan peserta pelatihan.
- d. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan antara lain menjahit, bordir, perakitan computer, fillet ikan, Barista, tehnik listrik , desain batik dan servis sepeda motor yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja sebanyak 51 paket peserta sejumlah 816 orang dengan sumber anggaran berasal dari DBHCHT.

8. Sasaran “Tertanganinya Permasalahan Kesejahteraan”.

Sasaran ke delapan dengan indikator **persentase penurunan PPKS**, tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,47%, realisasi persentase penurunan PPKS tahun 2023 sebesar 3,46% tercapai sebesar 99,71% dengan kategori capaian **Baik**.



9. Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa”.

Sasaran ke sembilan diukur dengan indikator **Indeks Desa Membangun (IDM)**, pengukurannya dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM Kab Probolinggo tahun 2023 tercapai sebesar 0,76 dari target 0,76. Capaian kinerja indikator IDM tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori capaian **Baik**.

Peningkatan kemandirian desa dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa dengan strategi :

- 1) Perbaikan fasilitas umum berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo No. 101 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Probolinggo.
- 2) Pengembangan ekonomi lokal dan promosi berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo No. 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa
- 3) Progam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui verifikasi dan penetapan Data P3KE

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kemandirian desa adalah:

- a. Kurang memadainya Fasilitas Umum yang ada di desa.
- b. SDM dan Disiplin Perangkat Desa masih rendah
- c. Potensi Ekonomi lokal kurang berkembang
- d. Penyebaran informasi dari Desa yang kurang maksimal terhadap masyarakat
- e. Tingkat kemiskinan masyarakat desa yang masih tinggi



Strategi peningkatan Indeks Desa Membangun yaitu menentukan program kegiatan prioritas dan alokasi anggaran serta upaya perbaikan atas kendala/permasalahan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki aksesibilitas fasilitas umum (jalan desa) untuk memudahkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa sejumlah 325 desa menggunakan dana desa
- b. Mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam ,sosial , dan budaya yang ada melalui Sub Kegiatan Fasilitasi BUMdes
- c.
 - 1). Memperkuat fungsi kelembagaan desa dan memaksimalkan peranan perangkat desa untuk memberikan informasi terkait kegiatan Desa pada masyarakat.
 - 2). Setiap desa wajib membuat infografis tentang kegiatan desa baik secara manual maupun berbasis web
- d.
 - 1). Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa
 - 2). Memberikan bantuan gerobak sayur dan modal usaha kepada pedagang sayur sejumlah 297 gerobak melalui 99 Bumdes yang berbadan hukum dengan menggunakan dana APBD pada subgiat fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa - kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 - 3). Memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat desa melalui JATIM PUSPA (BK Provinsi) dengan sasaran masyarakat graduasi PKH;
 - 4). Melakukan Bimtek EHDW (Electronic Human Development Worker) pada 24 Kecamatan (325 desa) di Tahun 2023;
 - 5). Memfasilitasi pengembangan Bumdes melalui BK Khusus Bumdes Provinsi Jawa Timur dengan sasaran 4 Bumdes.



10. Sasaran “Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk”.

Sasaran sepuluh diukur dengan indikator **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk** Tahun 2023 ditargetkan 0,1 realisasi 0,34 dan capaiannya 340 % kategori **Sangat Baik**.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran ke 10 sudah terpenuhi, didukung strategi-strategi diantaranya:

- d. Aktivasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang mengintegrasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
- e. Keterlibatan seluruh stakeholder (Kemenag, Puskesmas, DP3AP2KB, tokoh masyarakat, dan tenaga ahli/psikolog) dalam bentuk kegiatan Kelas Catin bagi calon pengantin yang bertujuan memberikan edukasi tentang persiapan pernikahan (parenting, kewajiban dan hak suami istri, KB, kecerdasan emosional, sex education dll).
- f. Untuk peningkatan efektifitas penanganan stunting dilakukan strategi pelibatan seluruh stakeholder, penyediaan sistem data yang akurat dan terintegrasi yang bertujuan menyediakan data anak stunting, resiko stunting, intervensi dan progres intervensinya sehingga dapat diambil kebijakan terkait penanganan tindak lanjut dan pencegahannya.
- g. Keberhasilan peningkatan usia harapan hidup yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan yang berdampak pula pada kenaikan IPM.

11. Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat”.

Sasaran ke-11 diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender/IDG, untuk tahun 2023 ditargetkan 72,60. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas PPAKB Provinsi Jatim disampaikan bahwa mulai tahun 2022 ada perubahan indikator untuk mengukur kinerja kesetaraan gender sebelumnya Indeks Pemberdayaan Gender diubah menjadi Indeks Ketimpangan Gender dan untuk tahun 2023 masih dalam perhitungan BPS.



Strategi peningkatan kesetaraan gender yaitu:

- Peningkatan jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural sehingga memiliki kewenangan pengambilan keputusan .
- Mendorong pemanfaatan IT khususnya bagi Ibu Rumah Tangga untuk berwirausaha contoh : membuka online shop.
- Pelatihan UMKM diutamakan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan jiwa wirausaha perempuan.

Misi Ke – 3

Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ke empat, dilakukan dengan 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan IV **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”** dengan indikator kinerja tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Target IRB tahun 2023 sebesar 70, terealisasi sebesar 77,26 (hasil LHE IRB tahun 2023) dengan capaian kinerja 110,37% kategori **Sangat Baik (SB)**

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini, diantaranya:

- Peningkatan komitmen kepala Daerah dan Kepala PD dalam pelaksanaan RB.
- Peningkatan Tim RB dan AKIP kabupaten didampingi Kementerian PAN RB dan Biro Organisasi Prov Jatim.
- Penyelarasan Dokumen RPJPD Kab Probolinggo Tahun 2025-2045 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jatim Tahun 2025-2045
- Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan standart pelayanan dan mengimplementasikannya di seluruh PD



- e. Penyusunan Regulasi Sistem Kerja Baru pasca PB
- f. Peningkatan implementasi sistem merit
- g. Peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan/SPBE
- h. Peningkatan inovasi di seluruh Perangkat Daerah dan desa
- i. Pembangunan ZI pada unit kerja layanan publik
- j. Aktivasi budaya kinerja melalui monitoring evaluasi pelaksanaan BerAKHLAK, pemantauan peran agen perubahan dan Benchmarking budaya kerja bersama tim transformasi budaya kerja Mendagri
- k. Monev Implementasi RB dan pelaksanaan kinerja langsung ke Perangkat Daerah dipimpin Bupati/Sekda dan Tim RB Kabupaten.

Secara rinci capaian kinerja tujuan IV dan sasaran-sasaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 4 dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
IV	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	F	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,76	66,75	65,72	62,82	63,05	77,26	70	110,37	Sekretariat Daerah
Sasaran Strategis													
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	13	Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	70,12	71,5	72,41	68,01	68,68	67,43	83	81,24	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappelithanada
		14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	70,114	70-80	100,00	BPPKAD
13	Birokrasi yang kapabel	15	Indeks SPBE	Nilai	1,8	2,85	2,85	2,59	2,42	3,33	3,5	95,14	Diskominfo Stansa
		16	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai/ Predikat	75	74	50,46	53,37	63,58	77,17	63	122,49	BKPSDM
14	Pelayanan publik yang prima	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	84,92	85,78*	88,39	84,61	84,75	84	100,89	PD Layanan Publik

Sumber : BPK, Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB, BKN dan Pengolahan Data PD terkait

12. Sasaran “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”

Sasaran ke dua belas diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu :

12.1. Indikator Nilai SAKIP

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Probolinggo, nilai SAKIP th 2023 (67,43) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (68,68). Apabila dibandingkan target tahun 2023 yaitu 83, maka capaian kinerjanya sebesar 81,24% dengan kategori **Baik**.

Tabel 3.10

Perkembangan Nilai SAKIP Kab. Probolinggo

no	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP	70,12	71,5	72,41	68,01	68,68	67,43
2	Predikat	BB	BB	BB	B	B	B

Sumber: LHE SAKIP KemenPAN RB

Dari tabel diatas, masih diperlukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Probolinggo secara terpadu pada 4 komponen yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Hambatan pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah antara lain adalah :

- Masih kurangnya kompetensi, kolaborasi dan optimalisasi peran Tim SAKIP Kabupaten.
- Belum selarasnya dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan tahunan dan penetapan indikatornya belum memenuhi kriteria SMART
- Evaluasi kinerja sudah melalui aplikasi e STAMINA, namun pengelolaan kinerja dan pemanfaatannya belum optimal.



- d. Masih belum meratanya kualitas pelaporan Kinerja PD dan belum menggali informasi kendala/permasalahan, Solusi, faktor penunjang dan strategi kedepan dalam peningkatan kinerja.
- e. Kurang maksimalnya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Tim Penilai Internal

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan diantaranya:

- a. Pendampingan dan konsultasi Tim SAKIP kabupaten ke Kementerian PAN RB dan Biro Organisasi Prov Jatim serta studi komparasi ke Kab/Kota lain yang mendapat predikat SAKIP A.
- b. Pendampingan ke PD untuk reviu dokumen perencanaan dan indikator kinerja
- c. Optimalisasi pemanfaatan e STAMINA dalam evaluasi capaian kinerja berkala pada seluruh level jabatan ASN dilingkungan Pemkab Probolinggo dengan melibatkan Kepala PD serta menyusun pedoman pengelolaan kinerja.
- d. Melakukan pendampingan dan Desk penyusunan laporan capaian kinerja PD untuk menjamin kualitas laporan kinerja PD.
- e. Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas internal melalui peningkatan SDM APIP (keikutsertaan Diklat evaluasi AKIP) dan melakukan monev atas TL evaluasi AKIP PD

12.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Indikator IPKD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70-80, hasil penilaian dari Kementerian Keuangan realisasi IPKD Kabupaten Probolinggo sebesar 70,144 dengan capaian 100% kategori **Baik (B)**. Capaian IPKD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2019 : 26.42, 2020 : 31.64, 2021 : 35.84 ,2022 : 50.60, 2023 : 70,114. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab Probolinggo terus



berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya dengan mengoptimalkan peran Tim TAPD melalui koordinasi pemenuhan implementasi IPKD yang lebih maksimal. Dimensi perhitungan indeks pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran.
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Penyerapan anggaran.
- e. Kondisi keuangan daerah.
- f. Opini BPK atas LKPD.

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Ketidaksesuaian pagu anggaran indikatif di dokumen perencanaan (RKPD) dengan anggaran KUAPPAS dan APBD.
- b. Mandatory spending untuk infrastruktur tidak mencapai 25% dari DTU.
- c. Realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah masih dibawah target.

Solusi yang telah dilakukan :

- a. Penguatan kesepakatan penetapan RKPD selaras/sama dengan KUAPPAS dan APBD melalui Berita Acara (BA) melalui Peraturan Bupati.
- b. Peninjauan kembali proses penganggaran APBD untuk penetapan anggaran mandatory spending melalui TAPD.
- c. Rapat koordinasi secara berkala bersama seluruh PD terkait peningkatan pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah untuk menyusun strategi realisasi sesuai target.

13. Sasaran “Birokrasi yang Bersih dan Kapabel”.

Sasaran ke dua belas ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu :

13.1. Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,



efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dengan memangkas biaya, waktu dan proses, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam mendukung pelayanan publik di pemerintah daerah.

Tahun 2023, target **Indeks SPBE** Kab Probolinggo ditetapkan sebesar 3,5, terealisasi 3,33 atau capaian kinerjanya sebesar 94,29% dengan kategori **Baik (B)**. Apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023, tahun ini mengalami kenaikan signifikan diakibatkan penambahan nilai pada aplikasi yang mendukung pelaksanaan RB tematik dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung kebijakan SPBE

Hambatan / kendala peningkatan indeks SPBE Kab Probolinggo, yaitu:

- a. Masih lemahnya domain kebijakan internal SPBE dikarenakan perubahan regulasi pemantauan dan evaluasi SPBE 2023.
- b. Masih rendahnya capaian nilai pada domain tata kelola SPBE yang terdiri atas aspek perencanaan startegis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi serta aspek penyelenggara SPBE
- c. Masih terlalu rendah capaian domain manajemen SPBE yang terdiri atas aspek penerapan manajemen SPBE dan audit TIK
- d. Kurang optimalnya capaian nilai pada domain Layanan SPBE yang terdiri atas aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik

Upaya peningkatan indeks SPBE Kab Probolinggo tahun 2023, antara lain :

- a. Melakukan penyesuaian dan penataan kembali regulasi yang dimiliki Kabupaten Probolinggo sehingga dapat sejalan dan relevan dengan regulasi ditingkat nasional dengan Perbup



Nomor 28 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

- b. Melaksanakan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, memperluas jaringan intra pemerintah hingga lebih dari 50%, pemanfaatan layanan pusat data nasional sementara (PDNS), pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, pengkoordinasian sistem keamanan informasi, membentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Probolinggo yang solid dan melaksanakan kolaborasi SPBE di sektor administrasi keuangan
- c. Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyelaraskan peta rencana SPBE dan dokumen renja OPD pengampu SPBE sehingga perencanaan Manajemen SPBE sudah dapat terdokumentasikan dengan baik
- d. 1). Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 telah menerapkan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 2). Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini terlihat adanya Penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.



Strategi peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan di Kab Probolinggo sebagai berikut:

- a. Peningkatan penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dengan penggunaan aplikasi SP4N Lapor, Layanan Data Terbuka menggunakan SATUDATA, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menggunakan JDIH, Layanan Publik Sektor 1 menggunakan OSS, Layanan Publik Sektor 2 menggunakan SASMITA, Layanan Publik Sektor 3 menggunakan AKSI dan di dalam penggunaannya dapat terlihat adanya transaksi basis data dan kolaborasi antar layanan SPBE/layanan pemerintah pusat serta perbaikan versi
- b. Peningkatan koordinasi dengan seluruh PD pengampu domain SPBE.

13.2. Indeks Profesionalitas ASN

Tahun 2023 hasil perhitungan **Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN** oleh BKN sebesar 77,17 (nilai sementara rilis 12 Oktober 2023) dari target 63 dengan capaian realisasi 122,49% kategori **Sangat Baik**.

Beberapa strategi peningkatan IP ASN, diantaranya :

- a. Surat Edaran Sekretaris Daerah agar seluruh ASN dapat memenuhi Diklat/pelatihan minimal 20 JP pertahun,
- b. Peningkatan disiplin dan kinerja pegawai dengan memasukkan aspek absensi dan kinerja sebagai bagian ***reward punishment*** pada Perbup TPP
- c. Pemrosesan dan pemberian hukuman tertulis bagi pegawai yang melanggar aturan kepegawaian bekerjasama dengan Inspektorat Daerah



- d. Penyesuaian kompetensi jabatan mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ),
- e. Pengelolaan kinerja pegawai terintegrasi melalui e STAMINA dengan melibatkan seluruh level jabatan dan penyusunan SKP

14. Sasaran “Pelayanan Publik Yang Prima”

Indikator sasaran ke 14 adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** pada PD pemberi layanan yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 84, tercapai sebesar 84,75, capaian kinerjanya 100,89% dengan kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.

Selain IKM, peningkatan pelayanan diukur dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dimana tahun 2023 Kab Probolinggo telah dilaksanakan penilaian pada 3 PD pemberi layanan yaitu Kec Leces, Dinsos dan RSUD Waluyojati dengan hasil IPP sebesar 3,89 (B).

Penilaian pelayanan publik lainnya adalah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI, pada beberapa unit pelayanan publik yaitu Dinas PMPTSP, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan 2 puskesmas, dengan hasil mendapatkan predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dengan nilai sebesar **87,14**. Hasil penilaian 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar **4,81 poin**.

Faktor keberhasilan peningkatan pelayanan publik, antara lain:

- a. Komitmen kepala daerah dan pimpinan PD untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemenuhan standar pelayanan.
- b. Respon cepat PD pemberi layanan untuk perbaikan layanan sesuai hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan tindaklanjut pengaduan.
- c. Adanya berbagai inovasi pelayanan publik yang semakin meningkatkan layanan pada masyarakat, yaitu :
 - 1) **Inovasi POSTING** (pemberdayaan mlijo peduli stunting bekerjasama dengan Puskesmas untuk menurunkan stunting),



SIRAMAH BERHUNTING dan SIMANIS BOLINGGO (Sistem informasi untuk intervensi keluarga yang memiliki bayi resiko stunting).

- 2) **Titik Koordinat, LINGKAR PATAS, LABUHAN HATI dan DRIVE THRU** (penunjang layanan perijinan).
- 3) **GO DIDITAL, PAKET PEDAS dan POKAK** (penunjang layanan administrasi kependudukan).
- 4) **BELA SANG RAJA dan GUNTING EMAS** (penunjang pendidikan).
- 5) **BUMI KRAKSAAN, NELAYAN MERDEKA** (peningkatan ekonomi untuk penunjang penanggulangan kemiskinan) dan **SASMITA** (sistem informasi integrasi data kemiskinan).
- 6) **PASAR PINTAR** (penunjang peningkatan PAD khususnya dari retribusi pasar)

Strategi peningkatan pelayanan publik, antara lain :

- a. Melakukan bimbingan teknis pada semua PD tentang penyusunan SP, MP, SOP dan pelaksanaan SKM.
- b. Pembinaan dan membuka konsultasi secara intens pada semua PD untuk peningkatan layanan publik.
- c. Monev secara berkala pelaksanaan layanan khususnya pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Mendorong inovasi dan memfasilitasi pembinaan inovasi pelayanan publik yang akan diajukan dan yang lolos pada kompetisi inovasi tingkat provinsi dan pusat
- e. Pendampingan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian layanan publik, baik yang dilakukan oleh Ombudsman maupun Kementerian PANRB.



**Misi Ke - 4
Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan**

Misi ke empat **“Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembanguna Berkelanjutan”**, dilakukan melalui 2 tujuan dan 7 sasaran. Adapun tujuan V adalah **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif”** dengan 2 indikator kinerja tujuan : Pertumbuhan ekonomi dan Koefisien Gini. Secara rinci perkembangan capaian tujuan V dan sasaraannya sebagai berikut :



Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke 5 dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
V	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	G	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,47	4,56	4,56	3,35	4,52	NA	3.67	NA	BPS
		H	Koefisien Gini	Koefisien	0,38	0,36	0,36	0,326	0.275	0.32	0.36	111,11	BPS
Sasaran Strategis													
15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataaan	18	Indeks pembangunan ekonomi	Indeks	-	-	-	-	5.10	6.53	5.1	128.04	Dinas Koperindag, Disporapar
16	Meningkatnya iklim investasi	19	Persentase Realisasi Investasi	Persentase	88,23	70	85,51	14,82*	21.76	NA	90.36	NA	DPM PSTP
17	Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan	20	Nilai Tukar Petani	Indeks	-	-	-	-	105.08	107.85	109.49	98.50	Dinas Pertanian
18	Meningkatnya ketahanan pangan	21	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	-	-	-	-	79.80	81.00	79.3	102.14	DKPP

Sumber : BPS dan pengolahan data oleh PD pengampu



Target indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 3,67 Realisasi dan capaian kinerjanya s/d penyusunan laporan ini belum diperoleh hasil perhitungan. Sedangkan indikator koefisien gini tahun 2023, dari target 0,36, terealisasi 0,32 capaian kinerjanya sebesar 111,11% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**.

Tujuan V dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator pencapaian sebagai berikut :

15. Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan Serta Kepariwisata”.

Indikator kinerja sasaran 1 ini adalah **Indeks Pembangunan Ekonomi** dengan target 0,51 dengan realisasi 6,53 dan capaian kinerja sebesar 128,04% predikat **Sangat Baik (SB)**.

Indeks Pembangunan Ekonomi merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan akses dan kesempatan

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum adanya kebijakan yang mendukung RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota) dengan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terbaru.
- b. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.
- c. Masih sedikitnya Industri Kecil dan Menengah yang memiliki Izin Usaha Industri, guna menciptakan Iklim Usaha yang tertib karena status legalitas perusahaan sudah lengkap.
- d. Belum terpantaunya kondisi industri secara menyeluruh, seperti: Ketersediaan Informasi Kapasitas Produksi, Bahan Baku, Bahan Bakar/Energi, Tenaga Kerja dan Investasi.



Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :

- a. Reviu Naskah Akademis PERDA tentang RPIK untuk disesuaikan dengan kondisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru dan koordinasi dengan OPD terkait.
- b. Peningkatan Kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk Industri Kecil & Menengah melalui pelatihan serta sertifikasi kemampuan dan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.
- c. Kegiatan Jemput Bola yang dilakukan Dinas PMPTSP untuk pengurusan ijin Industri Kecil dan Menengah ke kecamatan dan pameran-pameran yang melibatkan UKM.
- d. Sosialisasi kepada Perusahaan Industri agar menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala melalui Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

16. Sasaran “Meningkatnya Iklim Investasi”

Sasaran 16 diukur dengan indikator Persentase Realisasi Investasi dimana s/d penyusunan laporan ini hasil rilis data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Kab Probolinggo s/d triwulan 3 tahun 2023 sebesar 2,174 T dari target 4,8 T. Sehingga dari target persentase realisasi investasi tahun 2023 sebesar 90,32%, baru terealisasi 45,29%. Hasil realisasi investasi kumulatif s/d tb 4 tahun 2023 masih menunggu rilis data dari BKPM.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tingkat Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) masih rendah. Masih banyak pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM
- b. Adanya Regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang menghambat investasi dan lamanya proses permohonan revisi LSD untuk investasi di kementerian BKPM



Langkah untuk meminimalisasi permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan LKPM sebanyak 2 kegiatan, menyurati pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya pada aplikasi OSS, melibatkan satpol pp untuk mengingatkan pelaku usaha dan Berkoordinasi dengan BKPM Melakukan sosialisasi perijinan online langsung ke masyarakat, melalui media cetak dan elektronik dan meningkatkan monitoring dan pengawasan kepada pelaku usaha;
- b. Percepatan proses revisi LSD di kementerian ATR/BPN bersinergi dengan dinas PUPR dan ATR/BPN Kabupaten

Strategi yang dilakukan dan sedang dilakukan :

Selain selalu berupaya untuk melaksanakan regulasi bidang perijinan, tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Probolinggo sedang melakukan terobosan /inovasi yaitu :

- a. Penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang digunakan dalam promosi Investasi pada tahun 2023.
- b. Inovasi LABUAN HATI (Layanan Langsung Bawa Pulang Izin dengan Hangat, Amanah, Transparan dan Inovatif) bekerjasama dengan kecamatan untuk penerbitan ijin usaha UKM.
- c. Bersinergi dengan Dinas PUPR dan ATR/BPN terkait penyesuaian terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kementrian ATR/BPN
- d. Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha untuk bermigrasi dari OSS 1.1 ke OSS RBA dan pendampingan LKPM;

17. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nelayan”

Sasaran 17 diukur dengan indikator **Nilai Tukar Petani**. Dari perhitungan didapatkan hasil realisasi sebesar 107,85 dari target 109,49 capaian kinerjanya sebesar 98,50 % dengan kategori capaian **Baik (B)**. Kinerja Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nelayan didukung oleh pengalokasian anggaran yang cukup besar, kolaborasi dengan lintas



sektor (TNI dan Polri) khususnya dalam pengawalan input data kebutuhan s/d proses distribusi pupuk ke kios dan petani, serta kerjasama dengan BULOG dalam menampung gabah petani dengan harga kompetitif.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan petani dan nelayan antara lain :

- a. Kurangnya inovasi dalam pengelolaan pertanian pengolahan hasil panen
- b. Terbatasnya jumlah penyuluh dan petugas teknis peternakan
- c. Kurang meratanya akses pengairan pada lahan pertanian
- d. Pendistribusian benih, bibit, pakan, pupuk dan penjualan hasil kurang maksimal sehingga berdampak pada keterbatasan penyediaan.
- e. Kurangnya persediaan pakan dan minum ternak dimusim kemarau
- f. Kondisi cuaca yang tidak menentu
- g. Serangan Hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan peternakan
- h. harga BBM yang tinggi mengakibatkan biaya operasional nelayan meningkat, sehingga nelayan mengurangi jumlah trip penangkapan ikan. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan.

Solusi atas permasalahan tersebut, antara lain dengan:

- a. Melaksanakan pelatihan tematik dan sosialisasi geospasial bagi penyuluh pertanian di 24 Kecamatan total 86 peserta
- b. Pengajuan tambahan pegawai melalui seleksi P3K
- c. Infrastruktur tahun 2023 untuk jaringan irigasi air sudah terbangun 9 unit dan jalan usaha tani terbangun 4 unit
- d. RDKK dan alokasi yang transparan dan akurat dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi serta penyaluran hibah benih/bibit unggul yang bersertifikat SNI
- e. Pelatihan pembuatan pakan silase pada kelompok tani/tenak
- f. Update data perkembangan cuaca dari BMKG
- g. Suplay vaksin ternak sudah tercukupi dari Kementerian dan Pemprov



- serta pengadaan obat-obatan pengendali hama tanaman pertanian
- h. Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah agar nelayan lebih mudah mendapatkan bantuan subsidi BBM.

18. Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan”

Sasaran 18 diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan. Dari perhitungan didapatkan hasil realisasi sebesar 81 dari target 79,3 capaian kinerjanya sebesar 102,14 % dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Data konsumsi dan ketersediaan pangan hanya ditingkat Kabupaten, belum detail sampai ditingkat desa, sehingga analisis dan rekomendasi belum terinci sampai tingkat desa
- b. Pelaksanaan sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA belum terlaksana secara optimal

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan antara lain :

- a. Membuat rancangan dan meta data pengumpulan data statistik konsumsi dan ketersediaan pangan untuk seluruh Kabupaten Probolinggo
- b. mengikuti Lomba Cipta Menu tingkat Propinsi dengan harapannya mendapatkan informasi dan tambahan resep-resep untuk variasi makanan 4 sehat 5 sempurna

Strategi pencapaian target kinerja peningkatan ketahanan pangan melalui :

- a. penerapan Peraturan Bupati Nomor : 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab Probolinggo
- b. menyusun aplikasi pengumpulan data statistika konsumsi dan ketersediaan pangan di tahun 2024
- c. Melibatkan PKK dalam sosialisasi B2SA dan membuat buku pedoman resep-resep untuk makanan 4 sehat 5 sempurna yang akan dibagikan ke masyarakat



Tujuan VI **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja tujuan : Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan terdiri dari Indikator Keterjangkauan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Secara rinci perkembangan capaian tujuan VI dan sasarannya sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Ke VI dan Sasarannya

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2018-2023		PD Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian terhadap target akhir RPJMD	
VI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	I	Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (IKLI + IKLH)	Indeks	47	64,21	65,97	67,76	64.98	NA	63.85	NA	Bappelitbangda
Sasaran Strategis													
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah	22	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	-	-	-	-	-	NA	1.92	NA	DPUPR, Dinas PERKIM
20	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	23	Persentase Kawasan Permukiman Layak	Persentase	-	-	-	-	73.41	75.69	72.5	104.40	Dinas PERKIM
		24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	Persentase	-	-	-	-	71	75.00	74.5	100.67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	-	-	-	-	60.38	64.14	62.75	102.22	DLH

Sumber : BPS dan Pengolahan Data PD terkait



Dari tabel 3.12, realisasi Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (IKLI + IKLH) Kabupaten Probolinggo tahun 2023 s/d penyusunan laporan ini masih dilakukan proses perhitungan oleh Bapelitbangda.

IKLI menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana pengukurannya memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

IKLH merupakan gambaran dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu dan dihitung berdasarkan perhitungan 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) (30%), Indeks Kualitas Udara (IKU) (30%), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) (40%).

Untuk mencapai Tujuan VI, dilakukan melalui 3 (tiga) sasaran dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

19. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah”.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan bagian dari tema Pembangunan Kab Probolinggo tahun 2023 yang bertujuan menyediakan infrastruktur berkualitas yang mendukung Pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu strategis yang dihadapi Kabupaten Probolinggo adalah tingginya kesenjangan antar wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur Kabupaten Probolinggo serta wilayah perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan Indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, yang saat ini masih **dalam proses** perhitungan.

20. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan ruang Daerah”.

Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan 2 Indikator kinerja yaitu :

20.1. Persentase Kawasan Permukiman Layak

Tahun 2023, persentase kawasan permukiman layak tercapai sebesar 104,4% dari target sebesar 72,5% terealisasi 75,69% kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.

Berikut kendala dan permasalahan peningkatan kualitas pengelolaan Kawasan permukiman dan penataan ruang daerah:

- a. Belum update database RTLH dan Jumlah Rumah di Kabupaten Probolinggo menyebabkan baseline data yang digunakan adalah data BPS Tahun 2017.
- b. Penentuan rencana pelaksanaan rehabilitasi rumah bencana kurang optimal disebabkan tidak bisa memprediksi kejadian bencana.
- c. Sifat bencana yang ditangani masih terbatas pada bencana alam dan kebakaran hutan yang tercatat di BPBD Kab. Probolinggo, kebakaran rumah yang merupakan SPM Perumahan tidak tercatat di BPBD dan dianggap musibah.
- d. Pengumpulan data sanitasi dan air bersih dilakukan secara manual sebab belum ada sistem/aplikasi yang memadai, sehingga waktu pendataan butuh waktu lama.
- e. Masih adanya penolakan dari masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana air limbah (penolakan disebabkan tidak ada lahan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya sanitas.

Upaya-upaya yang dilakukan guna meminimalisir kendala dan permasalahan adalah :

- a. Mengupayakan perubahan target indikator kinerja, sebab apabila merubah baseline data akan berdampak pada capaian kinerja yang sudah ditargetkan didokumen perencanaan.



- b. Memperkirakan alokasi rumah bencana dengan melihat kejadian bencana yang terjadi di tahun sebelumnya dengan metode timeseries.
- c. Menangani pembangunan/rehabilitasi rumah bencana akibat kebakaran melalui usulan Rehabilitasi RTLH sejumlah 11 unit.
- d. Menggunakan perhitungan akses layanan air bersih dan sanitasi (air limbah) berdasar capaian tahun sebelumnya dengan menambahkan realisasi dari output capaian pekerjaan tahun berjalan (2023) dan mengaktifkan peran Pokja PKP harus lebih aktif dalam pengumpulan data air minum atau sanitasi.
- e. Peran serta tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dan pemahaman ke Masyarakat.

Strategi peningkatan kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas P3AP2KB, DispendukCapil dan Bapelitbangda terkait data baseline rumah, RTLH dan KK
- b. Mengoptimalkan kinerja Pokja PKP dengan integrasi data dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa-(DPMD) melalui Alokasi Dana Desa, dll untuk data akses air bersih dan sanitasi
- c. Berkoordinasi aktif dengan OPD lain khususnya Pokja PKP dengan melibatkan Dinas Kesehatan untuk keikutsertaan sanitarian

20.2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang tahun 2023 ditargetkan 74,5 terealisasi 75 dengan capaian kinerja 100,67% kategori capaian **Sangat Baik**.

Berikut hal- hal yang mempengaruhi kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :



- a. Meningkatnya kepatuhan masyarakat akan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Bupati Perbup Nomor 8 Tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Kraksaan Tahun 2022-2042 dan Perbup No 9 Tahun 2022, tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Paiton Tahun 2022-2042.
- b. Penyusunan RDTR wilayah kecamatan gending, kecamatan dringu , kecamatan pajarakan , kecamatan kraksaan dan kecamatan paiton dan sampai dengan saat ini sedang proses penyusunan Perbupnya
- c. Peningkatan pelayanan perijinan dengan menggunakan aplikasi OSS versi RBA yang berdampak pada kemudahan pengurusan ijin investasi.

21. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan Indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** ditargetkan tahun 2023 sebesar 62,75 terealisasi 64,14 dengan capaian kinerja sebesar 102,22% kategori capaian **Sangat Baik (SB)**.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. masih minimnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan, utamanya dalam hal pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah
- b. Kurangnya sarana prasarana perlengkapan pengangkutan persampahan antara lain armada/dumptruk
- c. Sarana Laboratorium Lingkungan Hidup kurang memadai, antara lain: peralatan analisa belum terkalibrasi, peralatan pemantauan kualitas lingkungan air merupakan alat dengan spesifikasi khusus tidak tersedia di sistem e purchasing.
- d. Jumlah dan jenis tenaga analis Labolatorium Lingkungan sangat terbatas. Sesuai hasil penghitungan Analisa Beban Kerja, diperlukan



16 orang personil teknis (yaitu : JF Pengendali Dampak Lingkungan, Jabatan Pelaksana Analis Konservasi Air dan LH, Pengelola Sampel Pengujian, Pengadministrasi Contoh Uji), namun saat ini masih terpenuhi sebanyak 9 orang.

- e. Belum maksimalnya pemanfaatan RTH
- f. Iklim elnino berdampak pada pencemaran air permukaan/sungai

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :

- a. menggalakkan peran aktif bank sampah dalam hal pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah
- b. Pengadaan alat berat wheellouder untuk pengolahan dan pengangkutan sampah sebesar Rp.500.000.000,-.
- c. Pengalokasian anggaran 800 juta dari DAU Kesehatan untuk akreditasi dan pemenuhan sarpras prioritas antara lain kalibrasi sebagian alat laboratorium, pengadaan alat di tahun 2023 dikhususkan untuk alat laboratorium yang akan di gunakan untuk parameter uji udara dan air.
- d. Tahun 2023 mendapat tambahan 1 JF analis kimia dari pengadaan P3K.
- e. Ruang Terbuka Hijau dijadikan fasilitas umum untuk kegiatan masyarakat berupa taman bermain, kuliner,fasilitas olah raga dll serta memperbanyak larangan membuang sampah sembarangan dan berjualan di area RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup
- f. pengambilan sample uji diperbanyak, melakukan pembinaan dan pengawasan ke pelaku usaha dengan melihat dokumen ijin lingkungan dan pembuangan limbah.
- g. Sosialisasi Perbup no 51 tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan harapan menurunkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat



Beberapa penghargaan yang diperoleh sebagai apresiasi atas upaya pelestarian lingkungan hidup di tahun 2023 antara lain penghargaan Adiwiyata Tingkat provinsi dan nasional pada 4 Sekolah. Selanjutnya, sebagai **upaya peningkatan kinerja kualitas lingkungan hidup akan dilakukan :**

- a. Pengajuan proposal ke word bank untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana persampahan.
- b. Optimalisasi upaya meraih penghargaan ADIPURA tahun 2024.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

A. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Pembagian alokasi anggaran di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tabel di bawah ini, disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran terhadap jumlah anggaran Belanja Langsung tahun 2022 :

Tabel 3.13
Persentase Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE
Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya toleransi antarumat beragama	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	37,073,291,463.00	1.68%
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2 Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	7,166,303,356.00	0.32%
3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	3 Indeks Ketahanan Daerah	4,308,608,612.00	0.20%
Sasaran Strategis				
4	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca	4 Indeks Pendidikan	766,213,206,042.00	34.70%
		5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,407,370,440.00	0.24%
5	Meningkatnya kualitas kesehatan	6 Indeks Kesehatan	503,688,475,572.00	22.81%
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	7 Indeks Daya Beli	35,058,430,665.00	1.59%

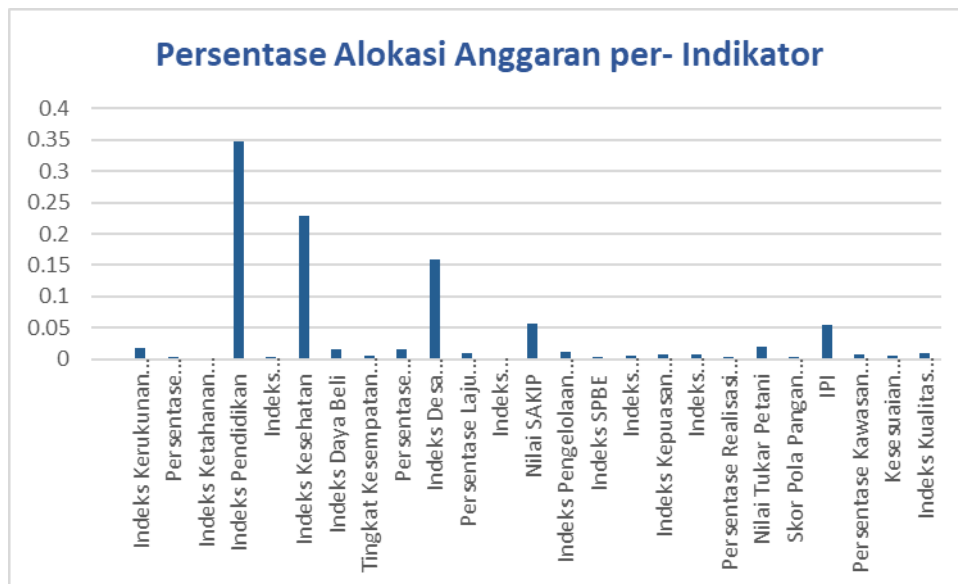


LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

Sasaran Strategis					
7	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	8	Tingkat Kesempatan Kerja	13,515,475,072.00	0.61%
8	Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial	9	Persentase Penurunan PPKS	35,465,858,072.00	1.61%
9	Meningkatnya kemandirian desa	10	Indeks Desa Membangun	351,733,184,840.00	15.93%
10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	11	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	20,629,312,088.00	0.93%
11	Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat	12	Indeks Pemberdayaan Gender	581,998,500.00	0.03%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	13	Nilai SAKIP	123,150,065,033.00	5.58%
		14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	27,201,826,268.00	1.23%
13	Birokrasi yang kapabel	15	Indeks SPBE	9,825,676,144.00	0.45%
		16	Indeks Profesionalitas ASN	11,556,934,256.00	0.52%
14	Pelayanan publik yang prima	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	17,089,022,871.00	0.77%
Sasaran Strategis					
15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisata	18	Indeks pembangunan ekonomi	18,767,727,336.00	0.85%
16	Meningkatnya iklim investasi	19	Persentase Realisasi Investasi	7,016,525,752.00	0.32%
17	Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan	20	Nilai Tukar Petani	41,575,300,011.00	1.88%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	21	Skor Pola Pangan Harapan	5,439,257,436.00	0.25%
Sasaran Strategis					
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah	22	Indeks Pembangunan Infrastruktur	119,221,960,420.00	5.40%
20	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	23	Persentase Kawasan Permukiman Layak	15,460,835,928.00	0.70%
		24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	9,989,437,500.00	0.45%
21	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	20,798,875,564.00	0.94%
			TOTAL	2,207,934,959,241.00	

Grafik 3.1

Diagram Alokasi Anggaran IKU Tahun 2023



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari grafik 3.1 terlihat, bahwa Indikator Kinerja Utama yang mendapat alokasi penganggaran terbesar adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Desa Membangun, nilai SAKIP dan Indeks Pembangunan Infrastruktur. Hal ini membuktikan bahwa prioritas pembangunan di Kab Probolinggo tahun 2023 telah didukung oleh pengalokasian anggaran pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu Pendidikan sebesar 34,70%, Kesehatan sebesar 22,81%, pengentasan kemiskinan melalui Indeks Desa Membangun sebesar 15,93% dan Infrastruktur Dasar sebesar 5,4%, sedangkan alokasi anggaran perbaikan tata kelola pemerintahan yaitu nilai SAKIP sebesar 5,58%.

B. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, berikut perbandingan antara kinerja dan anggaran pada tabel berikut.



Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76.5	78.12	102.12%	37,073,291,463.00	36,448,928,001.00	98.32%	3.80%
2	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05	1.32	125.71%	7,166,303,356.00	6,776,948,414.00	94.57%	31.15%
3	Indeks Ketahanan Daerah	0.58	0.59	101.72%	4,308,608,612.00	4,055,623,221.00	94.13%	7.60%
4	Indeks Pendidikan	0.56	0.56	100.00%	766,213,206,042.00	681,896,315,652.00	89.00%	11.00%
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.00	12.67	90.50%	5,407,370,440.00	5,040,231,774.00	93.21%	-2.71%
6	Indeks Kesehatan	0.76	0.83	109.21%	503,688,475,572.00	432,022,511,181.08	85.77%	23.44%
7	Indeks Daya Beli	0.74	0.75	101.35%	35,058,430,665.00	31,059,251,754.00	88.59%	12.76%
8	Tingkat Kesempatan Kerja	93.81	96.76	103.14%	13,515,475,072.00	12,204,371,213.00	90.30%	12.85%



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023**

9	Persentase Penurunan PPKS	3.47	3.46	99.71%	35,465,858,072.00	32,671,643,983.00	92.12%	7.59%
10	Indeks Desa Membangun	0.76	0.75	98.47%	351,733,184,840.00	350,023,358,323.00	99.51%	-1.04%
11	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.10	0.34	340.00%	20,629,312,088.00	18,645,285,941.00	90.38%	249.62%
12	Indeks Pemberdayaan Gender	72.44	NA	NA	581,998,500.00	516,685,200.00	88.78%	NA
13	Nilai SAKIP	83.00	67.43	81.24%	123,150,065,033.00	115,524,320,632.00	93.81%	-12.57%
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70-80	70,114.00	100.00%	27,201,826,268.00	23,199,935,369.00	85.29%	14.71%
15	Indeks SPBE	3.50	3.33	95.14%	9,825,676,144.00	9,072,284,983.00	92.33%	2.81%
16	Indeks Profesionalitas ASN	63.00	77.17	122.49%	11,556,934,256.00	10,117,573,129.00	87.55%	34.95%
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.00	84.75	100.89%	17,089,022,871.00	15,409,680,610.00	90.17%	10.72%
18	Indeks pembangunan ekonomi	5.10	6.53	128.04%	18,767,727,336.00	15,728,408,950.00	83.81%	44.23%
19	Persentase Realisasi Investasi	90,32	NA	NA	7,016,525,752.00	6,451,258,295.00	91.94%	NA
20	Nilai Tukar Petani	109.49	107.85	98.50%	41,575,300,011.00	37,966,795,985.00	91.32%	7.18%



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

21	Skor Pola Pangan Harapan	79.30	81.00	102.14%	5,439,257,436.00	5,117,826,178.00	94.09%	8.05%
22	Indeks Pembangunan Infrastruktur	1.92	NA	NA	119,221,960,420.00	94,786,830,069.00	79.50%	NA
23	Persentase Kawasan Permukiman Layak	72.50	75.69	104.40%	15,460,835,928.00	13,798,433,146.00	89.25%	15.15%
24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	74.50	75.00	100.67%	9,989,437,500.00	8,653,901,135.00	86.63%	14.04%
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.75	64.14	102.22%	20,798,875,564.00	19,898,654,336.00	95.67%	6.54%

Sumber : BPS, Hasil Olahan PD teknis dan * data sementara



Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel 3.14 diatas, dengan hasil sebagai berikut:

- a. 18 indikator sasaran strategis memiliki tingkat efisiensi.
- b. 3 indikator strategis tidak mengalami efisiensi yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, IDM dan Nilai SAKIP.
- c. 3 indikator sasaran belum dapat dihitung tingkat efisiensinya, dikarenakan belum ada hasil perhitungan realisasi kinerjanya.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2023, didorong oleh kebijakan meliputi:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 untuk penuntasan permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2023;
- e. Strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran;
- f. Peningkatan daya saing daerah didukung penumbuhan inovasi - inovasi baru dan pemantauan atas inovasi yang sudah dilaksanakan.



Dari hasil evaluasi keberhasilan pencapaian terhadap 6 tujuan dan 21 sasaran strategis dengan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 25 Indikator Kinerja Daerah (IKD), maka disimpulkan:

Dari 9 IKU, teridentifikasi sebagai berikut :

- a. 3 indikator kinerja dengan kategori capaian **Sangat Baik (SB)**
- b. 3 indikator kinerja dengan kategori capaian **Baik (B)** dan
- c. 3 indikator kinerja yang masih **dalam proses** perhitungan.

Dari 25 IKD, teridentifikasi sebagai berikut:

- a. 14 indikator kinerja dengan kategori capaian **Sangat Baik (SB)**
- b. 8 indikator kinerja dengan kategori capaian **Baik (B)**
- c. 3 indikator kinerja yang masih **dalam proses** perhitungan.

Lebih detail pencapaian kinerja IKU dan IKD sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.15

Pencapaian Indikator Tujuan (IKU) dan indikator Sasaran (IKD)

No	URAIAN			Jumlah Indikator Kinerja	KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	Sasaran	Indikator			SB	B	C	K	DP
Misi I . Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran									
Tujuan I : Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban Umum.		A	Indeks Ketenteraman Masyarakat	1	√				
1	Meningkatnya toleransi antarumat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1	√				
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	2	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	√				
3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	3	Indeks Ketahanan Daerah	1	√				
Misi II . Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan									
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.		B	Indeks Pembangunan Manusia	1		√			
4	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca	4	Indeks Pendidikan	1		√			
		5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1		√			
5	Meningkatnya kualitas kesehatan.	6	Indeks Kesehatan	1	√				



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

6	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Indeks Daya Beli	1	√				
Tujuan 3 : Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan.		C	Tingkat Pengangguran Terbuka	1		√			
		D	Tingkat Kemiskinan	1		√			
		E	Indeks Pembangunan Gender	1					√
7	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	8	Tingkat Kesempatan Kerja	1	√				
8	Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial	9	Persentase Penurunan PPKS	1		√			
9	Meningkatnya kemandirian desa	10	Indeks Desa Membangun	1		√			
10	Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk	11	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1	√				
11	Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat	12	Indeks Pemberdayaan Gender	1					√
Misi III . Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih									
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		F	Indeks Reformasi Birokrasi	1	√				
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	13	Nikai SAKIP	1		√			
		14	IPKD	1		√			
13	Birokrasi yang kapabel	15	Indeks SPBE	1		√			
		16	Indeks Profesionalitas ASN	1	√				



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023

14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	√				
Misi IV . Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan									
Tujuan 5 :Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif		G	Pertumbuhan ekonomi	1					√
		H	Koefisien Gini	1	√				
15	Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisata	18	Indeks pembangunan ekonomi	1	√				
16	Meningkatnya iklim investasi	19	Persentase Realisasi Investasi	1					√
17	Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan	20	Nilai Tukar Petani	1		√			
18	Meningkatnya ketahanan pangan	21	Skor Pola Pangan Harapan	1	√				
Tujuan 6 :Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan		I	Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (IKLI + IKLH)	1					√
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah	22	Indeks Pembangunan Infrastruktur	1					√
20	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	23	Persentase Kawasan Permukiman Layak	1	√				
		24	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	1	√				
21	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	√				



**3.3.2. Pengelolaan Keuangan Daerah
A. Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2022-2023**

Rek.	URAIAN	TAHUN			
		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.	PENDAPATAN	2.329.590.014.061,00	2.346.136.100.208,88	2.227.257.347.950	2.291.880.648.222,94
4.1	Pendapatan Asli Daerah	260.120.457.114,00	262.492.135.114,88	293.477.000.600	299.314.200.139,42
4.1.1	Pajak Daerah	67.998.341.000,00	84.081.515.062,80	86.265.000.000	88.717.504.471,18
4.1.2	Retribusi Daerah	21.572.086.430,00	17.420.770.580,00	25.587.448.734	22.789.600.311,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.616.387.068,00	6.616.387.067,94	6.616.387.068	6.746.983.892,86
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.933.642.616,00	154.373.462.404,14	175.008.164.798	181.060.111.464,38
4.2	Pendapatan Transfer	2.054.169.556.947,00	2.073.479.738.800,00	1.932.038.347.350	1.990.759.426.262,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.910.091.271.427,00	1.909.009.776.665,00	1.771.064.446.174	1.795.841.643.246,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.078.285.520,00	164.469.962.135,00	160.973.901.176	194.917.783.016,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	15.300.000.000,00	10.164.226.294,00	1.742.000.000	1.807.021.821,52
4.3.1	Hibah	15.300.000.000,00	10.060.110.294,00	1.742.000.000	1.710.206.821,52
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	104.116.000,00	0,00	96.815.000,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Sebelum Audit BPK Tahun 2023)

Pencapaian realisasi pendapatan daerah dari masing-masing komponennya menunjukkan tingkat realisasi yang cukup tinggi, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2023 terealisasi **101,99 %** sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi **100,91 %**, atau



naik sedikit sebesar 1,08 % dari tahun 2022.

- b. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) yaitu penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2023 terealisasinya **103,04 %** sedangkan Tahun 2022 terealisasinya **100,94%**, atau naik sebesar 2,10 % dari tahun 2021.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, mengalami kenaikan realisasi, tahun 2023 realisasinya **99,94 %** sedangkan tahun 2022 sebesar **94%**.

B. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 2.595.230.325.743** dan direalisasikan sebesar **Rp. 2.368.321.290.278,26** atau mencapai 91,26 %, dengan perincian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

NO	U R A I A N	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA DAERAH				
1	BELANJA OPERASI	1.747.856.386.867	1.605.259.301.526,26	91,84
2	BELANJA MODAL	263.018.251.251	231.030.373.629,00	87,84
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.577.571.625	5.382.959.122,00	9,51
4	BELANJA TRANSFER	527.778.116.000	526.648.656.001,00	99,79
JUMLAH		2.595.230.325.743	2.368.321.290.278,26	91,51

Sumber : BPPKAD Kabupaten Probolinggo sebelum Audit BPK – RI tahun anggaran 2023

Jika dilihat dari komposisinya, realisasi belanja di tahun 2023 antara lain belanja operasi sebesar 91,84 %, realisasi belanja modal sebesar 87,84 %, realisasi belanja tidak terduga **9,51 %**, dan belanja transfer sebesar **99,79 %**.



C. Realisasi Pembiayaan Daerah

Adapun Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2023 secara keseluruhan dengan perincian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.18
Perincian Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	U R A I A N	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan	336.095.546.063,00	336.313.395.634,06	387.972.977.793	388.622.339.603,12
2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		316.095.546.063,00	316.313.395.634,06	367.972.977.793	368.622.339.603,12

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 – Sebelum Audit BPK Tahun 2023

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 terus mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, realisasi tahun 2023 sebesar 100,17 % sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pembiayaan terealisasi **100,06%**. Realisasi pengeluaran pembiayaannya tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100 %. Jumlah Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Adapun anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan perincian sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 3.19

Perincian Anggaran Dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	U R A I A N	Tahun 2022			Tahun 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0,00
3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000.000	20.000.000.000	100,00	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 – Sebelum Audit BPK 2023



BAB IV PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan ***good governance***, sekaligus sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak- pihak terkait.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati didalam RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 telah ditetapkan 6 tujuan yaitu :

- Pertama : Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum.
- Kedua : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- Ketiga : Meningkatkan Keadilan dan Kesenjangan Gender, serta pengentasan kemiskinan.
- Keempat : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Kelima : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Keenam : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Tujuan ini diukur dengan 9 Indikator Kinerja dan guna mencapai tujuan ditetapkan 21 Sasaran strategis yang diukur dengan 25 Indikator Kinerja.

Dari hasil evaluasi keberhasilan pencapaian 6 tujuan diperoleh hasil :

- a. **3 Indikator tujuan** dengan kategori **Sangat Baik (SB)**.
- b. **3 Indikator tujuan** dengan kategori **Baik (B)** dan
- c. **3 Indikator tujuan** belum diketahui capaian kinerjanya



yaitu indeks pembangunan gender dan persentase pertumbuhan ekonomi yang masih menunggu rilis data dari BPS serta indeks keterjangkauan layanan infrastruktur yang berkelanjutan yang masih dalam perhitungan Bapelitbangda.

Dari 21 sasaran strategis diperoleh hasil capaian :

- a. 14 Indikator sasaran atau 56 % dengan kategori **Sangat Baik**.
- b. 8 Indikator sasaran atau 28 % dengan kategori **Baik**.
- c. 3 Indikator sasaran atau 16% dengan realisasi nilai capaian kinerja belum dapat ditetapkan yaitu persentase realisasi investasi dan indeks pembangunan infrastruktur karena masih dalam proses perhitungan, sedangkan indikator pemberdayaan gender sudah tidak dilakukan perhitungan oleh BPS .

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dan capaian realisasi keuangan, dan dari 25 indikator sasaran, menunjukkan :

- a. 19 Indikator sasaran mengalami **efisiensi**
- b. 3 Indikator sasaran **tidak mengalami efisiensi** yaitu Indeks Pembangunan Literasi Membaca, Indeks Desa Membangun dan nilai SAKIP
- c. 3 Indikator sasaran **belum dapat dihitung tingkat efisiensinya**, dikarenakan belum ada hasil realisasi kinerjanya

Dari hasil rata-rata perhitungan 21 indikator sasaran diperoleh rata-rata capaian realisasi sebesar **107,19 %** atau termasuk kategori **Sangat Baik (SB)** dan ada 3 indikator sasaran yang masih dalam proses perhitungan/penetapan.



1.2. STRATEGI PERBAIKAN KINERJA

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang, langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain :

- a. Penyelarasan dokumen perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah, baik dari sisi keselaran perencanaan, pengukuran kinerja (pemenuhan indikator SMART), evaluasi capaian kinerja dan pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang didukung oleh pengawasan akuntabilitas internal oleh APIP.
- b. Penyempurnaan Pohon Kinerja dengan melaksanakan Bimtek seluruh PD.
- c. Optimalisasi integrasi sistem pengelolaan kinerja dan implementasinya dengan melibatkan seluruh level jabatan.
- d. Optimalisasi program satu data Kab Probolinggo sebagai *based* data pengambilan kebijakan kepala daerah dan kepala PD dengan mengintegrasikan pada digitalisasi administrasi pemerintahan.
- e. Finalisasi dan penetapan Perkada tentang sistem kerja dampak penyederhanaan birokrasi.
- f. Pembangunan inovasi baru dan pemantauan keberlanjutan inovasi-inovasi yang sudah berjalan dengan harapan mampu mendongkrak kinerja organisasi.
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang tata kelola pemerintahan (khususnya akuntabilitas dan manajemen kinerja) dengan pendamping/narasumber dari Kementerian PAN RB.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil



penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen penuh dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan pelayanan prima serta mewujudkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”***

